Pemerintah Kabupaten Solok

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2010

Drs. H. SYAMSU RAHIM

BUPATI SOLOK PERIODE 2010 - 2015

Drs. DESRA EDIWAN ANAN TANUR

WAKIL BUPATI SOLOK PERIODE 2010 - 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011 SAMPAI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional Tahun 2009 sampai Tahun 2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-352 Tahun 2010 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Solok Propinsi Sumatera Barat;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-353 Tahun 2010 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Solok Propinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2001 tentang Cara Pertanggungjawaban Bupati Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2000 Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28 Seri E 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN TAHUN 2011 SAMPAI TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Solok.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Solok.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Instansi Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
8. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2015.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2015.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Agenda Pembangunan Daerah adalah tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam pembangunan daerah selama lima tahun.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus utama yang menjadi pilihan dalam pembangunan daerah sesuai dengan issu strategis pembangunan.
19. Masalah Pembangunan Daerah adalah perbedaan yang terjadi antara kenyataan dengan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
20. Sasaran Pembangunan Daerah adalah hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Kegiatan Pokok Pembangunan Daerah adalah instrumen kebijakan yang merupakan rencana aksi pembangunan daerah yang terdiri dari pengalokasian sumber daya manusia, dana dan peralatan dengan menetapkan tolok ukur keberhasilannya seperti keluaran, manfaat dan dampak terhadap pembangunan.
24. Program adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, Misi dan Program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2010.
(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
    a. SKPD dalam menyusun rencana strategis SKPD.
    b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    c. Pemerintah Nagari dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dan SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun rencana strategis SKPD.

Pasal 5

DPRD melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan ke dalam rencana strategis SPKD.

Pasal 6

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI SOLOK,

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

A S R I Z A L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2010 NOMOR .....

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI SOLOK,

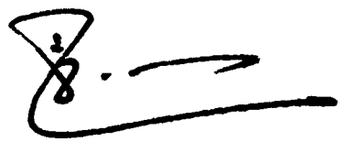

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di Arosuka
pads tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

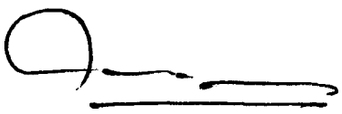

A S R I Z A L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2010 NOMOR .....

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Landasan Hukum 2

BAB II GAMBARAN UMUM DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SAMPAI TAHUN 2010
2.1. Wilayah 3
2.2. Penduduk 4
2.3. Perekonomian 8
2.4. Pemerintahan 11

BAB III KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011-2015
3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 12
3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 14
3.3. Kebijakan Umum Anggaran 15

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Isu-isu Strategis Pembangunan Nasional 17
4.2. Prioritas Pembangunan Nasional dan Dampaknya terhadap Kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok 21

BAB V VISI, MISI DAN TUJUAN PEMERINTAHAN TAHUN 2011-2015
5.1. Visi 28
5.2. Misi 30
5.3. Tujuan 31
5.4. Program Prioritas 32

BAB VI KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011-2015 34

BAB VII PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR UTAMA TAHUN 2011-2015 38

BAB VIII MATRIK RINCIAN DAN TARGET TAHUNAN RPJMD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015 55

BAB IX PENUTUP 94

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Nasional. Hal ini berarti bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Oleh karena itu pula, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJMD Tahun 2011-2015 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh unit kerja dan perangkat daerah Kabupaten Solok.
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8, 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SAMPAI TAHUN 2010

2.1. Wilayah

Secara geografis Kabupaten Solok berada pada posisi antara 01^0 20' 27" - 01^0 2'39" LS dan 100^0 25' 00" - 100^0 33' 43" BT dengan luas wilayah 373.800 Ha (3.738,00 Km^2). Posisi tersebut secara ekonomis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Padang, ibu kota propinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Sebagian besar (38.88 %) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02 % berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang telah diolah untuk perladangan/kebun lebih kurang 10.35 % dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09 %. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.28 % dan termasuk areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Suhu udara dan curah hujan di wilayah kabupaten ini sangat berfariasi karena dipengaruhi oleh topografi wilayahnya yang berbukit dan tidak rata serta memiliki perbedaan yang cukup tajam antara satu kawasan dengan kawasan lain karena terletak pada ketinggian 329 sampai 1.458 M di atas permukaan air laut. Pada daerah dataran rendah, suhu udara berkisar antara 28,50°C – 31,30°C, sedangkan pada dataran tinggi suhu berkisar antara 12,50°C – 24,60°C. Curah hujan cukup tinggi, rata-rata 1.206 mm dan 65 hari pertahun yang hampir merata di setiap daerah. Namun demikian, daerah bagian utara mempunyai curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah bagian tengah dan selatan.

Dengan semua perbedaan kondisi alam tersebut, hampir seluruh wilayah Kabupaten Solok tergolong rawan terhadap bencana alam. Bencana yang sering terjadi meliputi erosi, gerakan tanah, banjir dan bahaya gunung

berapi. Letak Kabupaten Solok yang berada pada daerah patahan semangka mempengaruhi pula tingkat kestabilan permukaan tanah, terutama di daerah perbukitan dan rawan terhadap gempa bumi.

2.2. Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Solok tercatat 348.566 jiwa. Kecamatan Kubung tetap merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 55.303 jiwa, dengan tingkat kepadatan 288,04 jiwa / km2. Diikuti oleh Kecamatan Lembah Gumanti dan Gunung Talang. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tigo Lurah, IX Koto Sungai Lasi, dan Payung Sekaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan per Kecamatan
Tahun 2010

No.	Kecamatan	Luas Daerah (km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (/km2)
1	Pantai Cermin	366	20.337	55,57
2	Lembah Gumanti	459,72	53.178	115,68
3	Hiliran Gumanti	263,28	16.053	60,98
4	Payung Sekaki	364,5	8.027	22,06
5	Tigo Lurah	602,5	9.574	15,89
6	Lembang Jaya	99,9	25.752	257,78
7	Danau Kembar	70,1	18.853	268,95
8	Gunung Talang	385	46.738	121,40
9	Bukit Sundi	109	22.827	209,43
10	IX Koto Sungai Lasi	171	9.671	56,56
11	Kubung	192	55.303	288,04
12	X Koto Singkarak	257	31.686	123,30
13	Junjung Sirih	295,5	12.106	40,97
14	X Koto Diatas	102,5	18.461	180,11
Jumlah		**3738**	**348.566**	**93,25**

Sumber : Susenas BPS Kab. Solok 2010

Sebaran menurut kelompok umur yang sekaligus menggambarkan piramida penduduk adalah seperti grafik dibawah ini;

Grafik 2.1
Sebaran Penduduk menurut Kelompok Umur

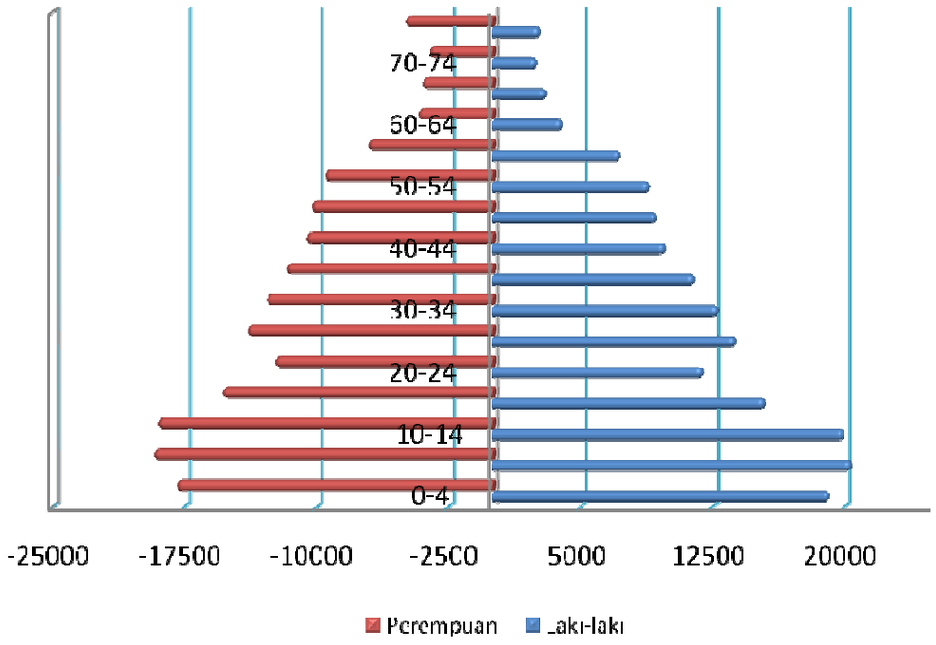

Piramida penduduk di atas memperlihatkan penurunan jumlah penduduk yang signifikan pada usia 20 – 24 tahun. Usia tersebut adalah usia pendidikan tinggi. Oleh karena banyak yang menjalaninya di luar Kabupaten Solok, maka secara perhitungan kependudukan, mereka tidak terhitung sebagai penduduk Kabupaten Solok. Mereka tercatat sebagai penduduk di tempat domisili.

Dari jumlah penduduk tersebut, 233.004 jiwa adalah penduduk usia 15 tahun ke atas dan 166.775 diantaranya merupakan angkatan kerja.

Tabel 2.2
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan

No.	Kegiatan Utama	Jumlah
1	Bekerja	161.700
2	Pengangguran	5.075
3	Bukan Angkatan Kerja	67.259
4	Angkatan Kerja	166.775
Penduduk usia 15 tahun keatas		233.004
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		71.57 %
Tingkat Pengangguran Terbuka		2.17%

Sumber: Sosnaker 2010

Pertanian masih menjadi lapangan kerja utama dimana 62,25 % penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor tersebut. Sektor yang diharapkan berkembang cepat adalah perdagangan, jasa dan industri.

Tabel 2.3
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Pekerjaan Utama

No.	Lap. Pekerjaan Utama	Jumlah
1.	Pertanian	100.635
2.	Industri	5.916
3.	Perdagangan	20.523
4.	Jasa	16.734
5.	Lainnya*)	17.892
Total		**161.700**

***)** Pertambangan, Listrik, Bangunan, Angkutan dll

Salah satu persoalan mendasar dalam ketenagakerjaan adalah tingginya jumlah tenaga kerja tidak dibayar. Dari jumlah penduduk yang bekerja, 22,82 % diantaranya merupakan pekerja yang tidak dibayar. Umumya disebabkan oleh alasan membantu keluarga, orang tua atau suami, dan sebagian besar di sektor pertanian. Mereka masuk ke dalam kelompok pengangguran tidak kentara. Dengan demikian, secara ril angka pengangguran jauh lebih tinggi daripada yang tercatat pada tabel 2.2.

Tabel 2.4
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut
Status Pekerjaan Utama

No.	Status Pekerjaan Utama	Jumlah
1.	Berusaha Sendiri	29.222
2.	Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	37.334
3.	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	6.667
4.	Buruh / Karyawan	27.980
5.	Pekerja Bebas Pertanian	17.766
6.	Pekerja Bebas Non Pertanian	5.824
7.	Pekerja Tak Dibayar	36.907
Total		**161.700**

Tingginya angka kelompok produktif berpengaruh pula terhadap jumlah pencari kerja per tahun. Pada Tahun 2010 tercatat sebanyak 225 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok. Dari jumlah yang terdaftar tersebut sebagian besar diantaranya adalah wanita yaitu sebanyak 176 orang atau sekitar 78%.

Grafik 2.2

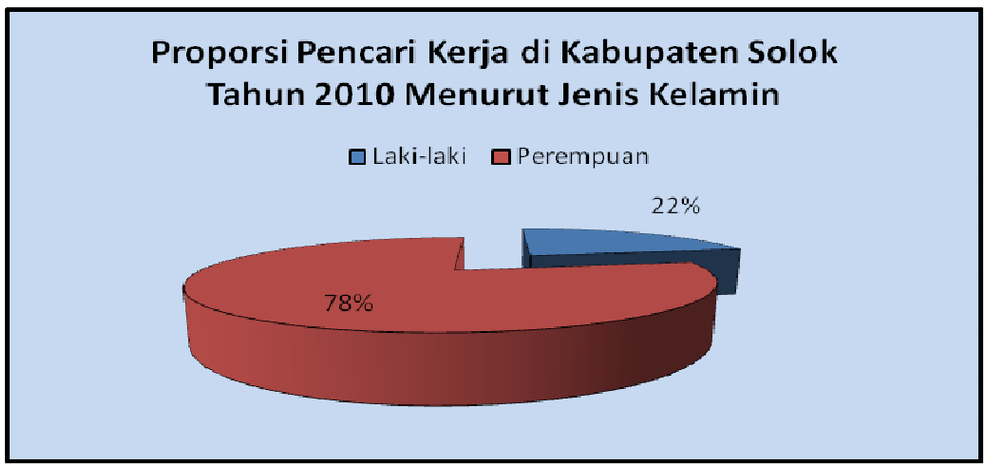

Dari sisi pendidikan yang ditamatkan, para pencari kerja mulai bergeser dan didominasi oleh tamatan Sarjana dan Diploma. Jumlah terbesar ada di kelompok lulusan Diploma yaitu sebanyak 107 orang atau sekitar 48%, selanjutnya diikuti oleh lulusan Sarjana sebanyak 91 orang, lulusan SMA sebanyak 25 orang, kemudian lulusan SD dan SMP masing-masing 1 orang.

Grafik 2.3

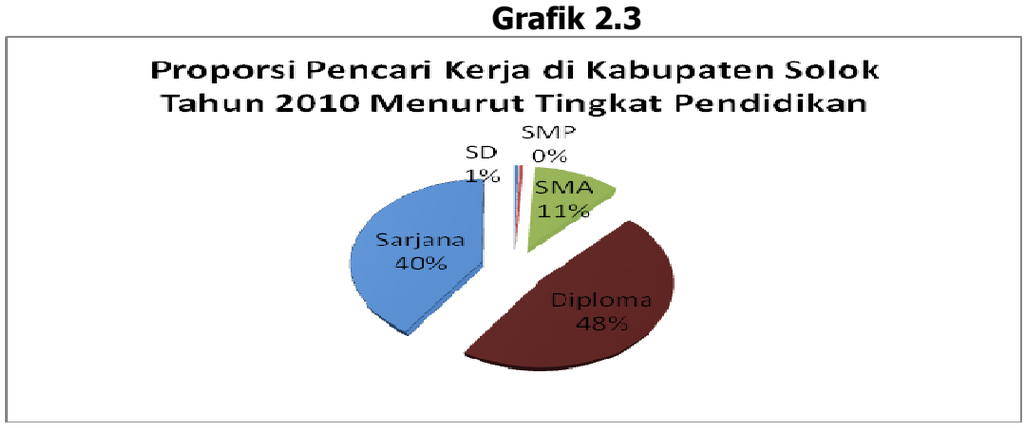

Sumber : Dinas Sosnaker Kab. Solok 2010

2.3. Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan sampai dimana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sektor ekonomi tertentu.

a. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Secara makro perekonomian Kabupaten Solok memperlihatkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok

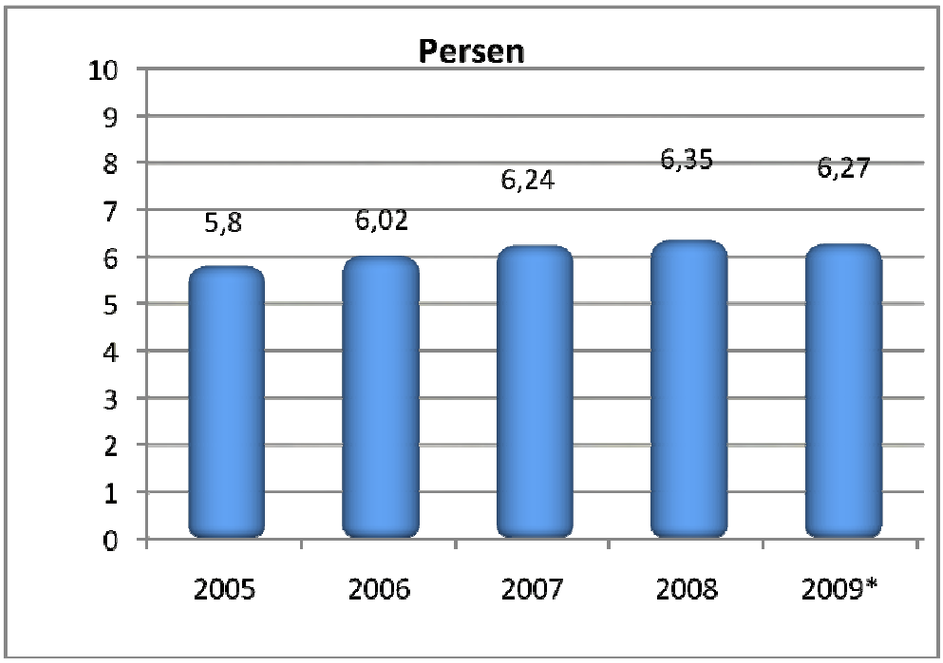

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dipengaruhi oleh pertumbuhan pada berbagai sektor dan memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Namun, bila menelaah lebih lanjut sampai subsektor ekonomi, maka akan terlihat variasi laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi.

Struktur perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian yang diukur terhadap sembilan sektor ekonomi / lapangan usaha. Struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap

pembentukan PDRB pada daerah tertentu. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu *(time series),* maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi.

Grafik 2.5

Pertumbuhan Ekonomi Persektor di Kabupaten Solok Tahun 2008-2010

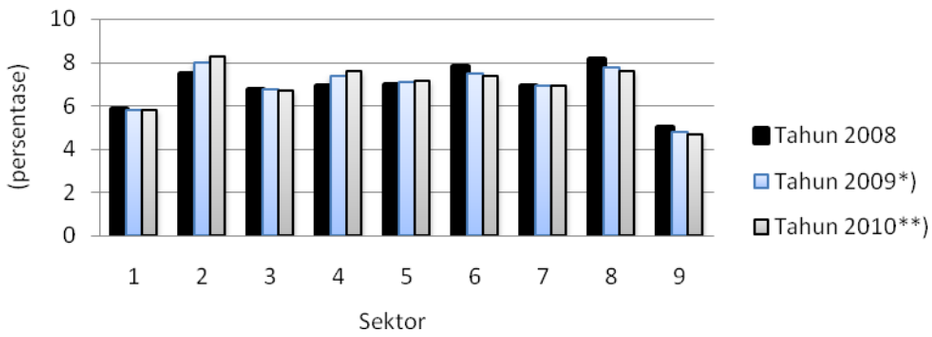

Ket. Sektor:
1. Pertanian
2. Pertambangan dan Galian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik & Air
5. Bangunan / Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
7. Angkutan & Komunikasi
8. Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

b. PDRB Persektor

Indikator atau alat ukur yang selalu dipergunakan untuk mengetahui laju pembangunan ekonomi di satu wilayah dalam satu periode tertentu adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Regional Bruto Perkapita, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu wilayah. Sedangkan Pendapatan Regional Bruto Perkapita adalah nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk dalam satu tahun tertentu.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dihitung berdasarkan harga setiap komoditi barang dan jasa setiap tahun. Hal ini dipergunakan untuk menghitung pendapatan (produktifitas) ekonomi yang dapat dinikmati oleh penduduk di satu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang dipergunakan untuk menghitung nilai tambah barang dan jasa atau untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PDRB berarti semakin tinggi pula kemampuan sumber daya ekonomi masyarakat.

Kinerja perekonomian Kaupaten Solok yang dipresentasikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Tahun 2000 masih mampu mengalami pertumbuhan yang cukup baik sampai Tahun 2009. Hal ini membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang telah menjadi isu nasional tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Solok.

Tahun 2009 PDRB Kabupaten Solok atas dasar harga berlaku mencapai Rp 4,6 triliun, meningkat dari Rp 4,04 triliun pada Tahun 2008. Sedangkan atas dasar harga konstan Tahun 2000 meningkat menjadi Rp 2,04 trilun pada Tahun 2009 dibanding tahun sebelumnya Rp 1,92 triliun. Pertumbuhan ini berpengaruh pula terhadap PDRB Perkapita seperti terlihat pada grafik berikut ini (dalam juta rupiah).

Grafik 2.6

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Solok

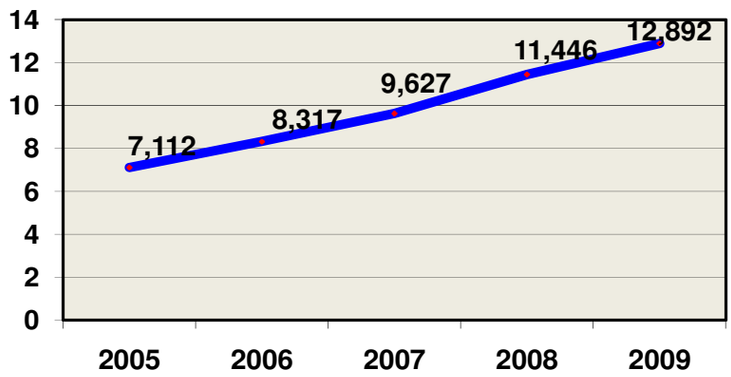

Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi masih dihasilkan oleh sektor pertanian yakni; 44,73 % persen. Selain sektor pertanian, sektor yang juga memiliki kontribusi cukup besar adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana kontribusinya mencapai 13,38 %. Pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 11,38 %. Hal ini menunjukkan

bahwa pertanian masih menjadi andalan utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Solok.

Grafik 2.7
Persentase PDRB Kabupaten Solok 2009-2010

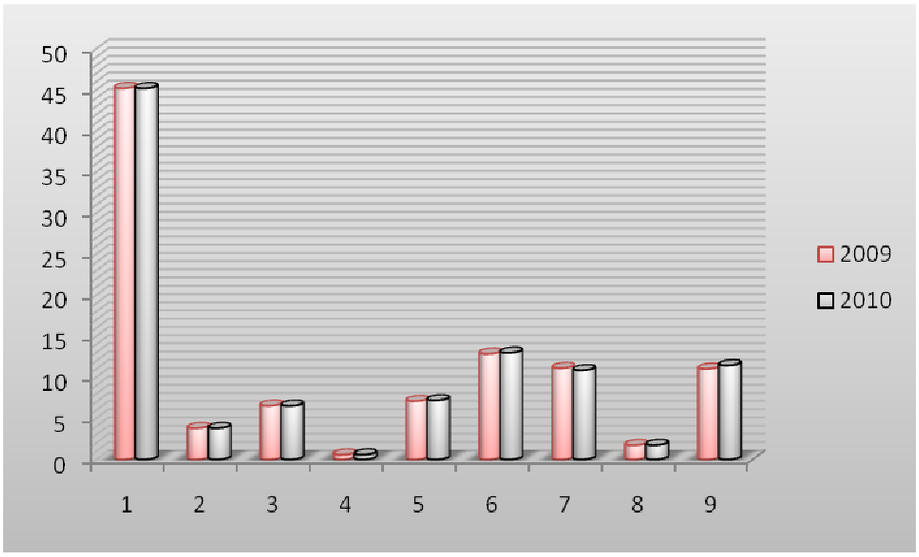

Gambaran lebih lengkap tentang perkembangan ini disajikan dalam pembahasan tersendiri.

2.4. Pemerintahan

Saat ini Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan dengan 74 nagari dan 403 jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari, sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing hanya memiliki 2 nagari. Kecamatan yang memiliki jorong terbanyak adalah Kecamatan X Koto Diatas dengan jumlah 51 jorong dan kecamatan yang memiliki jorong paling sedikit adalah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Junjung Sirih dengan jumlah masing-masing 11 jorong.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Solok diperkuat oleh 7.232 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). 59,92% diantaranya adalah perempuan (BKD, 2010). Dari sisi golongan kepangkatan, 22,92 persen merupakan pegawai golongan empat, 50.54 persen pegawai golongan tiga, 24.95 persen pegawai golongan dua dan sisanya 1.59 persen pegawai golongan satu

BAB III
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2011-2015

3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Implementasi otonomi daerah menuntut terciptanya performa keuangan daerah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, Kabupaten Solok menghadapi persoalan rendahnya performa keuangan daerah. Akibatnya, porsi anggaran untuk membangun sarana prasarana dan kualitas pelayanan Publik semakin terbatas.

Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Solok yang dituangkan kedalam dokumen APBD tampak mengalami peningkatan yang sangat tajam, terutama sampai Tahun 2008. Tahun 2009 dan 2010 peningkatan tersebut mulai melambat seiring kebijakan nasional.

Jumlah pendapatan daerah Kabupaten Solok dari 2005 s/d 2010 adalah sebesar Rp 2,46 triliun setara dengan rata-rata 409,74 milyar pertahunnya seperti terlihat pada grafik berikut;

Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010

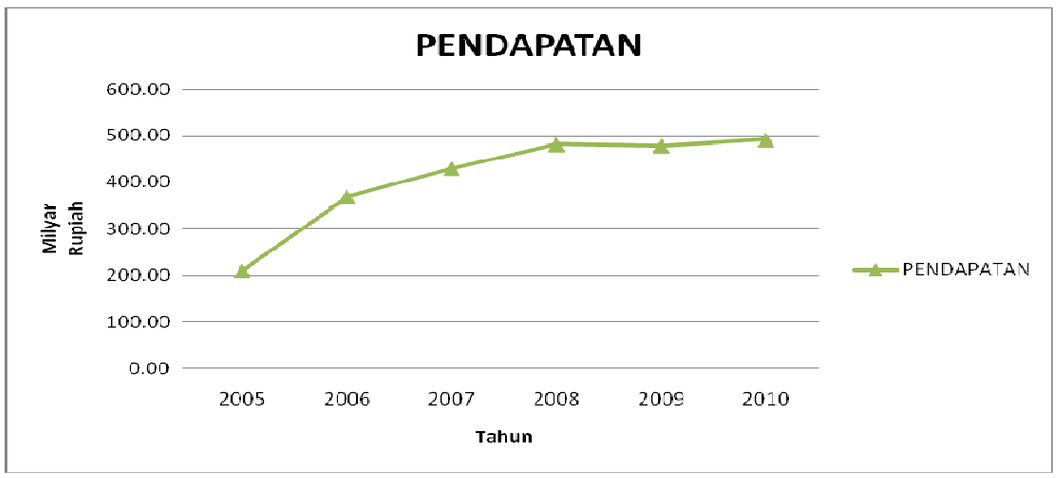

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari;

1. **Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :**
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah, dan
   c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2. **Dana Perimbangan terdiri dari :**
   a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
   b. Dana Alokasi Umum (DAU)
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
   d. Bagi hasil dari Provinsi

3. **Lain – lain pendapatan yang sah**

   Adalah pendapatan yang diterima yang sumbernya selain dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan**.**

Grafik 3.2
Kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
Tahun 2005-2010

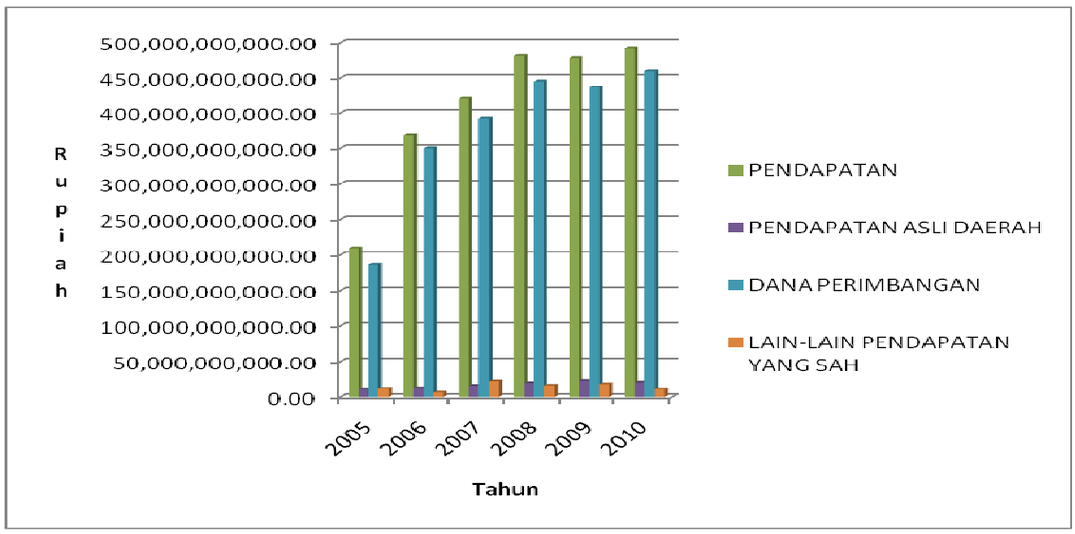

Gambaran data yang diperlihatkan oleh Tabel 3.1 menunjukan eksisnya beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Solok. Persoalan mendasar dibidang keuangan ini adalah relatif tingginya tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Solok terhadap transfer dana dari Pusat. Selama Tahun 2005 s/d 2010 rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah hanya 4,21 %. Konsekuensinya, ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat sangat tinggi.

Tantangan untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah melalui peningkatan realisasi potensi rill PAD. Diperlukan upaya maksimal dan kreatif agar kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah meningkat. Berdasarkan permasalahan dan tantangan lima tahun ke depan yang dihadapi, maka arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Solok lebih difokuskan kepada penguatan basis PAD melalui penguatan basis ekonomi masyarakat dan penciptaan struktur insentif ekonomi yang tepat dan produktif.

3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Pelimpahan wewenang oleh pusat ke daerah menimbulkan konsekuensi langsung terhadap peningkatan besaran pengeluaran pemerintah daerah. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap daerah adalah pelimpahan wewenang di sisi pengeluaran kurang proporsional dengan pelimpahan wewenang di sisi penerimaan. Akibatnya, hampir setiap daerah kabupaten dan kota menghadapi fiskal gap yang cukup signifikan. Dampak nyata yang sangat dirasakan oleh setiap daerah adalah relatif besarnya porsi pengeluaran daerah untuk aktivitas rutin daerah (belanja rutin). Dalam periode Tahun 2007-2010, kencendrungan komposisi belanja daerah Kabupaten Solok seperti diperlihatkan oleh grafik berikut :

Grafik 3.3
Besaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

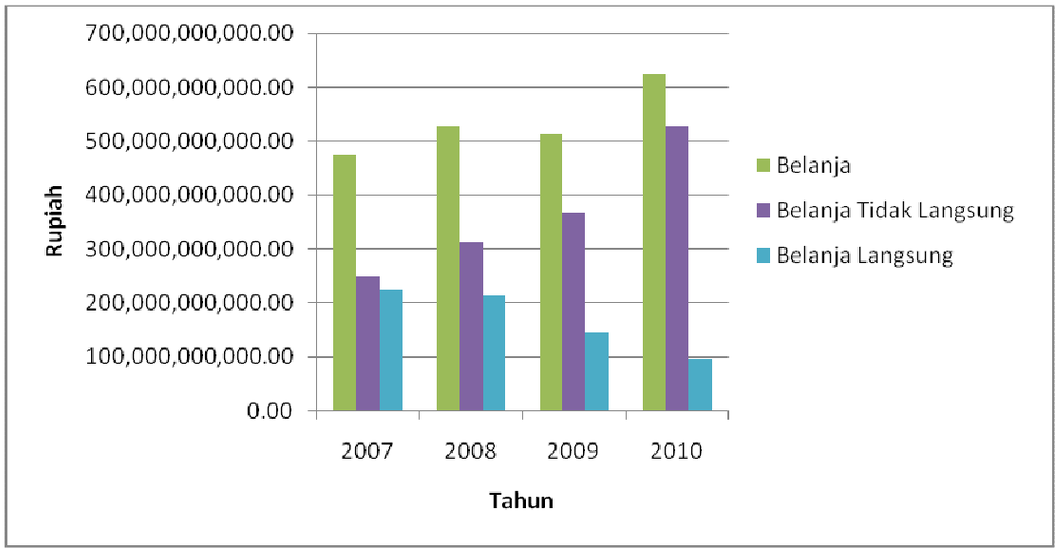

Gambaran data di atas memperlihatkan relatif besarnya porsi pengeluaran daerah untuk kegiatan aktifitas rutin pemerintahan daerah

Kabupaten Solok. Rata-rata porsi belanja rutin, gaji PNS dan operasional kantor sebesar 61,7%. Berarti hanya sebesar 38,3% alokasi anggaran untuk pembangunan daerah Kabupaten Solok. Fenomena ini menunjukan bahwa tantangan dan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam bidang belanja daerah adalah sangat rendahnya porsi anggaran belanja yang dapat dialokasikan untuk percepatan pembangunan daerah Kabupaten Solok. Di sisi lain, pencapaian visi dan misi daerah sangat menuntut anggaran belanja pembangunan dengan porsi yang lebih besar.

Untuk 5 tahun ke depan harus diupayakan secara maksimal peningkatan belanja pembangunan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Solok untuk 5 tahun ke depan harus lebih difokuskan kepada: (a) peningkatan porsi belanja pembangunan daerah tanpa mengorbankan porsi belanja rutin yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan; (b) mengkoordinir seluruh dinas/instansi dalam pengelolaan dan pengalokasian kucuran dana dari pusat dalam bentuk dana dekonsentrasi, hibah, perbantuan, dan lain-lain (c) memaksimalkan peran dunia usaha dalam bentuk investasi dan lain-lain.

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran daerah yang berkaitan dengan sisi pendapatan daerah yang perlu dirumuskan dan diimplementasikan adalah:

1. Pengembangan dan penguatan basis PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi regional dan lokal.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan setiap pos PAD.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
4. Peningkatan pengetahuan dan skill khusus SDM pengelola PAD.
5. Peningkatan kualitas data base tentang potensi rill PAD oleh seluruh dinas/instansi pengelola PAD.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi Perda tentang PAD.
7. Peningkatan kualitas manajemen pendapatan daerah.
8. Peningkatan kualitas manajemen perusahaan daerah sebagai basis PAD.

Kebijakan umum anggaran daerah yang berkaitan dengan sisi belanja daerah yang perlu dirumuskan dan diimplementasikan adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah sehingga setiap belanja daerah harus memperlihatkan adanya hubungan yang jelas antara target/sasaran (output) dengan program, kegiatan dan anggaran (input).
2. Peningkatan akuntabilitas anggaran belanja kepada publik.
3. Peningkatan konsistensi dan disiplin anggaran belanja dengan kebutuhan rill pembangunan daerah.
4. Peningkatan porsi anggaran untuk memfasilitasi aktifitas ekonomi regional dan lokal.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Isu-isu Strategis Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur : Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam kurun waktu 2010-2014, sesuai RPJM Nasional, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan Global yang meningkat :

Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2009 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat

Indonesia yang sejahtera. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi jika laju pertumbuhan hanya mencapai 6% per tahun. Teknologi yang makin maju telah mengurangi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang.

Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk *(inclusive growth).* Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Mengingat peningkatan kapasitas ini memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilakukan secara konsisten dan kontiniu dengan sasaran yang terarah, jelas dan tepat.

Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar secara merata, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk

bekerja (*employable*) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja.

Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi Tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Resiko kerusakan lingkungan hidupun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktifitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di tingkat nasional maupun antar daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktifitas. Peningkatan produktifitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya

manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi Indonesia perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dan setiap daerah dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing nasional.

Kesembilan, demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Dewasa ini pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan. Harus diakui, sebagian masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Selanjutnya, terkait erat dengan demokrasi adalah desentralisasi. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dalam integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun¸ saat ini fungsi hukum untuk menuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari masih belum menemukan format yang ideal dalam memberikan keadilan bagi seluruh anak bangsa.

4.2. Prioritas Pembangunan Nasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Pembangunan Kabupaten Solok

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyusunan rencana prioritas pembangunan daerah harus merujuk kepada permasalahan dan prioritas pembangunan nasional. Hal merupakan amanat undang-undang perencanaan pembangunan dan bagian dari etika bernegara dan berbangsa. Dari semua prioritas pembangunan nasional, dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan, potensi dan kebutuhan pembangunan lokal. Tujuannya adalah terwujud pembangunan yang efektif, efisien, proporsional, selaras dan akuntabel dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera.

Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional sampai Tahun 2014, Kabupaten Solok berada pada Koridor Satu, yang meliputi wilayah Sumatera dan Banten. Prioritas nasional pada koridor ini adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengentasan ketertinggalan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, sumber daya alam serta pembangunan industri.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan ini dan rata-rata secara nasional dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8% per tahun. Jika pemulihan ekonomi global terjadi secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata tersebut diharapkan dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai 7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan menjadi 10%-8% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6%-5%.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekedar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai

dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Perlindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik, terampil dan sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam lima tahun ini telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan. Kita harus menunjukkan proses perjalanan sejarah bangsa ini dalam sebuah kontiniutas proses yang konsisten. Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan itu, diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem yang memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan bila proses *checks* and *balances* berjalan dengan baik.

Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat

pada periode 2010-2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim (climate change) tersebut.

Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya. Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang komprehensif membangun lembaga pemerintahan yang kompeten, bersih dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten. Misi pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014. Namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah Tahun 2010-2014 sebagai berikut :

Pertama: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera, Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kedua: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi. Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dalam menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

Ketiga: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Pembangunan yang adil dan merata serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk

unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan.

Di sisi lain, pembangunan daerah tertinggal harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, pendanaan serta penerapan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional ditempatkan dalam satu kerangka dasar yang dikenal dengan pembangunan yang *pro growth, pro poor, pro job dan pro green.* Paradigma tersebut telah menjadi isu global.

Masyarakat dunia sepakat untuk menitikberatkan pembangunan ke suatu tujuan bersama yakni; pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Kerangka dasar tersebut disepakati pula dalam kesepakatan Millenium Development Goal's (MDG's). Kesepakatan tersebut mengikat negara-negara di dunia untuk pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kemiskinan, sosial budaya serta pelestarian lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan bangsa Indonesia, Kabupaten Solok tidak terlepas dari paradigma tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah harus pula mempedomani kesepakatan bersama dimaksud, karena terkait dengan kerangka pembangunan nasional.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang patut menjadi acuan dan perhatian utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan adalah;

1. Diperlukan reformasi birokrasi secara simultan, terarah dan efektif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih, profesional dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di awal masa Otonomi Derah, Kabupaten Solok pernah menjadi daerah yang terkenal dengan inovasi dan terobosan dalam berbagai hal sehingga sering menjadi rujukan bagi daerah lain. Namun harus diakui bahwa sebagian besar daerah yang dulunya berpedoman ke Kabupaten Solok sekarang bergerak jauh lebih maju.
2. Jumlah penduduk miskin Tahun 2009 tercatat lebih kurang 12,15 % atau 40.819 jiwa. Di samping itu, 24 nagari tergolong nagari tertinggal dan 16 diantaranya sangat tertinggal.
3. Pencapaian target MDG's juga adalah tanggung jawab kabupaten/kota. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif terhadap penduduk miskin dan nagari tertinggal harus menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkannya diperlukan ketersediaan data yang akurat dan lengkap serta program yang terpadu. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan fokus
4. Kabupaten Solok memiliki potensi alam yang berlimpah dengan iklim yang mendukung dan berada pada posisi yang strategis. Jika potensi ini tidak dimanfaatkan dan tidak digarap secara maksimal justru akan merugikan kehidupan masyarakat dan ketahanan lingkungan. Dibutuhkan kebijakan

pembangunan yang konsisten dan ramah lingkungan, mulai dari penataan ruang sampai kepada pengembangan wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut tidak saja bagi masyarakat Kabupaten Solok tetapi juga bagi daerah lain karena Kabupaten Solok merupakan hulu dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir sampai ke Propinsi Jambi dan Riau. Sebagian besar hutannya juga adalah kawasan hutan lindung dan masuk ke dalam kawasan TNKS.

5. Sebagai daerah dengan sumber mata pencaharian penduduknya ada pada sektor pertanian, dibutuhkan perhatian dan keseriusan yang lebih besar agar mampu mengembangkan pertanian yang bernilai tambah tinggi dan tidak merusak lingkungan. Saatnya pertanian berbasis tekhnologi dan organik dikembangkan secara massal.
6. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan ketahanan sosial dan budaya. Perkembangan peradaban moderen harus disikapi secara hati-hati agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai tardisi mereka.

BAB V
VISI, MISI DAN TUJUAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015

5.1. Visi

Paradigma pembangunan moderen yang dipandang paling efektif dan dikembangkan di banyak kawasan untuk merebut peluang dan menghadapi tantangan global adalah pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan dan menempatkan setiap individu dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek yang harus dibangun. Proses pembangunan disusun dalam satu rencana yang sistematis, partisipatif, demokratis, transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, makmur, beradab dan berketuhanan sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan salah satu jalan untuk mencapai ke cita-cita tersebut. Semenjak desentralisasi, dalam banyak hal, daerah lebih leluasa untuk mengatur rumah tangganya termasuk dalam proses penentuan kepemimpinan.

Secara substansial Pemilihan Kepala Daerah Langsung mempunyai kontribusi kepada demokratisasi melalui beberapa poin di antaranya; ***Pertama***, bentuk pengakuan akan kedaulatan rakyat yang berbasis individu, Pemilihan Kepala Daerah melalui parlemen pada dasarnya mereduksi pilihan bebas individu karena mandat yang diberikan kepada legislatif cenderung diaplikasikan dengan motif ***Political Interest*** oleh partai-partai yang mengisi kursi legislatif. Dengan pemilihan Kepala Daerah Langsung mandat primordial itu dikembalikan lagi kepada individu dan dengan sendirinya semakin mendekat ke arah prosedur demokrasi. ***Kedua***, lahirnya pemimpin yang kuat legitimasinya. Pemilihan langsung dengan hak suara di tingkat individu akan semakin menempatkan Kepala Daerah pada posisi yang sangat *legitimate* secara sosial dan politik. Dia mendapatkan mandat langsung dari rakyat yang memiliki daulat penuh pada daerah geografisnya. ***Ketiga***, terbangunnya kontrak sosial baru. Karena pola hubungan pemilihan Langsung antara pemilih

dengan yang dipilih, maka secara tak langsung tercipta kontrak sosial yang berisi kesepakatan moral bahwa pemimpin hadir untuk rakyat.

Kebutuhan akan visi dan misi secara teknis bukan hanya sekedar amanat Undang-undang atau aturan prosedural Pemilihan Kepala Daerah lainnya. Tetapi juga merupakan tawaran konseptual sekaligus menjadi pintu masuk untuk melakukan transaksi gagasan dengan masyarakat dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok yang sudah disahkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2005.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Merujuk kepada definisi tersebut, maka visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu sampai 2015, adalah : "**TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"**

Kepemerintahan yang Baik atau biasa disebut dengan *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabilitas, efisien, responsif, penegakan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good Governance* haruslah memiliki sikap dasar "kebijakan publik" yang tidak berdiri netral ketika berhubungan dengan lemahnya nilai tawar masyarakat yang tidak mampu bersaing dengan kelompok elit yang memiliki akses begitu cepat kepada sumber daya ekonomi.

Kepemerintahan yang baik juga ditunjukkan oleh birokrasi yang secara aktif melakukan intervensi di wilayah "hulu" sehingga tercipta situasi persaingan yang lebih adil. Wilayah hulu ini misalnya pendidikan, pelatihan, ketersediaan informasi bahkan kesehatan juga bagian dari hulu sebuah persaingan. Jadi tampak jelas "keberpihakan" birokrasi kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Pemerintahan seperti ini dibutuhkan untuk menjadi dasar bagi terlaksananya tugas pemerintahan yang populis dan berorientasi menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Indikator keberhasilan Kepemerintahan yang baik adalah 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan, dan 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah, kualitas, kuantitas dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Sedangkan masyarakat **Sejahtera** adalah sebuah kondisi dimana tercipta pemerataan ekonomi (termasuk infrastruktur) dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Solok menjadi satu tubuh yang terhubung satu sama lain dengan prinsip kesetaraan dalam arti menurunkan ke titik nol kadar eksploitasi dan manipulasi secara ekonomi, sosial dan budaya.

Sejahtera tidak saja berdimensi keadilan ekonomi, lebih jauh sejahtera juga merupakan cerminan dari kualitas individual dan masyarakatnya. Dengan demikian pendidikan, kesehatan dan kapasitas lokal juga bagian penting yang sangat erat dengan kesejahteraan. Adapun yang menjadi indikator masyarakat Kabupaten Solok **sejahtera** adalah; (1) peningkatan kesejahteraan spritual dan budaya yang ditandai dengan adanya tatanan kehidupan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), (2) peningkatan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan penurunan kemiskinan, dan (3) peningkatan kesejahteraan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi.

5.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum.
2. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan.

4. Menciptakan pendidikan berkualitas.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang.
7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan.
8. Membangun kepariwisataan.

5.3. Tujuan

Dari visi dan misi tersebut, terdapat dua tujuan besar yang ingin dicapai selama Tahun 2011-2015, yakni;

1. Terwujud tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok, yang ditandai dengan :

    a. struktur pemerintahan yang ramping, proporsional, efektif dan efisien;
    b. tertib administrasi dan tata laksana kepemerintahan;
    c. tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah yang ditandai dengan perolehan opini terbaik dari lembaga berwenang;
    d. tinggi efektifitas dan Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP) terhadap pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan, perolehan standar **ISO 9001** untuk manajemen mutu pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan;
    e. tinggi partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan;
    f. transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan
    g. responsif terhadap bencana alam dan bencana sosial

2. Terwujud masyarakat Kabupaten Solok yang sejahtera;

    a. sejahtera spiritual, sosial dan budaya;
    b. sejahtera ekonomi;

    Sejahtera secara spiritual, sosial dan budaya ditandai dengan :

    a. makin baik kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat;
    b. makin baik derajat dan kualitas pendidikan;
    c. makin baik derajat kesehatan masyarakat;
    d. makin tinggi mobilitas dan kenyaman sosial budaya; dan

e. terpelihara hubungan sosial budaya berdasarkan filosofi ABS-SBK;

Sejahtera ekonomi ditandai dengan :

a. makin tinggi kemampuan daya beli masyarakat;
b. tingkat kemiskinan dan kesenjangan semakin kecil;
c. bebas daerah terisolir dan tertinggal; dan
d. tingkat kerusakan dan daya dukung lingkungan terkendali

5.4. Program Prioritas

Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Penyusunan program pembangunan tersebut diselaraskan pula dengan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka terdapat dua agenda besar pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, yaitu;

1. Pembangunan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; sejahtera spritual, sosial dan budaya serta sejahtera secara ekonomi.

Dua agenda besar tersebut dijabarkan ke dalam ke dalam 8 (delapan) agenda prioritas pembangunan yaitu;

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih;
2. penataan kehidupan yang religius dan berbudaya sesuai Adat Basandi Syara' Syarak' Bersendi Kitabulah;
3. pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan;
4. percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial;
5. peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan;
6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

7. pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah; dan
8. peningkatan pembangunan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.

Tabel 4.1
Persandingan Prioritas Pembangunan RPJMN & RPJMD Propinsi Sumatera Barat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010-2014	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROP. SUMBAR TAHUN 2011-2015	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SOLOK THN 2011-2015
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, & pasca-konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi	1. Pengamalan prinsip ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan 3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 5. Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi dan berdaya saing tinggi 6. Pengembangan industri pengolahan, jasa dan perdagangan 7. Pengembangan kawasan Wisata Alam 8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan 9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat 10. Mitigasi dan penanggulangan bencana alam 11. Pelestarian lingkungan hidup	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih 2. Penataan kehidupan yang religius dan berbudaya 3. Pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan 4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial 5. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 7. Pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah 8. Peningkatan pembangunan pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan

BAB VII
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015

A. AGENDA PRIORITAS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

No	VISI	MISI	TUJUAN	AGENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
1	2	3	4	5	6
	TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA	1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum 2 Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya 3 Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis tekhnologi dan pelestarian lingkungan 4 Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang 5 Menciptakan pendidikan berkualitas 6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 7 Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan perempuan 8 Membangun kepariwisataan	1 Terwujud tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih di Kabupaten Solok 2 Terwujud masyarakat Kabupaten Solok yang sejahtera : a. sejahtera spiritual, sosial dan budaya b. sejahtera ekonomi	**AGENDA 1** **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih** **AGENDA 2** **Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK**	1 Tertib administrasi dan tata laksana kepemerintahan - Tertib administrasi dan pengelolaan keuangan dan asset ; opini terbaik (WTP) tiga tahun berturut-turut 2 Tercipta Kualitas pelayanan publik - Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ≥3.5 - Diperoleh ISO 9001 untuk pelayanan publik tertentu 1 Semarak syiar agama di surau / mesjid dan ditengah masyarakat - Berkembangnya didikan subuh di 74 nagari - Berkembangnya wirid remaja mesjid di 74 nagari - Berkembangnya majleis taklim di 74 nagari 2 Menguatnya peran unsur tali tigo sapilin - Terlaksananya musyawarah tali tigo sapilin dalam rangka membahas persoalan-persoalan nagari, minimal 3 kali setahun di 74 nagari 3 Bertambahnya kader ulama/imam/khatib disetiap nagari (3 orang per nagari)

1	2	3	4	5	6
				AGENDA 3	
				Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Terpadu Berbasis Tekhnologi dan Pelestarian Lingkungan	1 Terwujud kawasan pertanian organik terpadu seluas 500 Ha
					2 Tercapai swasembada pangan (daging dan ikan)
					Ekonomi makro :
					1 Menurunnya angka kemiskina dari 12% menjadi 6%
					2 Menurunnya angka pengangguran dari 7% menjadi 5,5 %
					3 Meningkatnya produktifitas pertanian
					- Produktifitas pertanian
					- Produksi coklat
					- Tanaman strategis lainnya (enau, tebu, jagung, markisa, karet, kopi dll)
					4 100% dokumen perencanaan pembangunan mempunyai KLHS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
				AGENDA 4	
				Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal , Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial	1 Tuntas pengentasan 24 nagari tertinggal
					2 Tersedia jaminan pelayanan sosial bagi 100 % penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
				AGENDA 5	
				Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan	1 Tercapai tuntas Wajar Dikdas Paripurna
					2 Terpenuhi 100% SPM bidang pendidikan
					3 Persentase lulus SLTA diterima di Perguruan Tinggi Negeri : 10%

1	2	3	4	5	6
				AGENDA 6	
				Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	1 Tercapai 100 % target Millenium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan 2 Tercapai 100 % standar pelayanan minimal kesehatan 3 Terpenuhi 100 % persyaratan minimal RSUD type C
				AGENDA 7	
				Pengembangan Kepariwisataan dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah	Tercapai Kabupaten Solok sebagai Destinasi wisata unggulan kawasan sumatera : 1 Kunjungan wisatawan nusantara meningkat 60 % dari tahun 2010 2 Wisata mancanegara meningkat 50 % dari tahun 2010
				AGENDA 8	
				Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan	1 Berkembang kelompok pemuda produktif dan mandiri di 14 Kecamatan 2 Masuk lima besar dalam Porprov Sumatera Barat 3 Makin baik angka pembangunan gender yang ditunjukkan dengan Indek Pembangunan Gender (IPG) sebesar 0,95

B. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

Agenda 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1.	**Reformasi Tata Kelola dan Tata Laksana Administrasi Pemerintahan**		
1.1	Penataan Organisasi dan Keseimbangan beban Kerja	1.1.1 Penataan organisasi perangkat Daerah 1.1.2 Penilaian kinerja secara berkala	1 Tertib administrasi dan tata laksana kepemerintahan - Tertib administrasi dan pengelolaan keuangan dan asset ; opini terbaik (WTP) tiga tahun berturut-turut 2 Tercipta Kualitas pelayanan publik
1.2	Penataan system administrasi dan tata laksana (tata kerja) pemerintahan	1.2.1 Peninjauan instrument hukum (Perda/Perbub) tata kerja dan tata laksana pemerintahan dan pengendalian pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) serta penyusunan prolegda sampai 2015 1.2.2 Penataan rentang kendali dan pendelegasian kewenangan/ urusan pemerintahan. 1.2.3 Penyusunan SPM dan SOP 1.2.4 Pengawasan dan pengendalian kebijakan SPM dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	- Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ≥3.5 - Diperoleh ISO 9001 untuk pelayanan publik tertentu
1.3	Penataan system pengelolaan keuangan dan asset daerah	1.3.1 Penyusunan System dan prosedur serta standar pelayanan minimal (SPM) Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah 1.3.2 Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan asset daerah pada setiap SKPD dan unit kerja 1.3.3 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan, penatausahaan keuangan dan asset daerah	
1.4	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1.4.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	
1.5	Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas SDM pejabat dan Aparatur Pemerintah	1.5.1 Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas pejabat dan SDM Aparatur Pemerintah	
2.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Aparatur dan Pemerintah**		
2.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.1.1 Membangun System dan manajemen unit pelayanan dan pengaduan masyarakat on-line dan off-line. 2.1.2 Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	

1	2	3	4
2.2	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	2.2.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 2.2.2 Peningkatan jaminan kesejahteraan pejabat dan aparatur	
2.3	Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan	2.3.1 Penataan kawasan ibukota 2.3.2 Penataan kawasan kecamatan 2.3.3 Penataan aturan mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana. 2.3.4 Pembangunan kantor pemerintahan 2.3.5 Penyediaan sarana peningkatan dan pengendalian mutu dan kualitas pembangunan infrastruktur	
3.	**Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**		
3.1	Peningkatan koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	3.1.1 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	
		3.1.2 Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	
4.	**Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**		
4.1	Transparansi data dan informasi daerah berbasis tekhnologi informasi	4.1.1 Pelaksanaan transparansi penyelenggaraan pemerintahan termasuk di bidang keuangan daerah. 4.1.2 Pembangunan sistem tekhnologi sistem informasi pembangunan daerah (e-government)	
4.2	Peningkatan partisipasi masyarakat	4.2.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan	
5.	**Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air**		
5.1.	Pembinaan kehidupan berbangsa dan berpolitik serta pengembangan rasa solidaritas masyarakat	5.1.1 Pemantapan wawasan kebangsaan bagi ormas, orsos, OKP , organisasi keagamaan dll 5.1.2 Pembinaan kehidupan berpolitik 5.1.3 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan trantibmas	

Agenda 2: Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat.	1.1 Pembinaan keluarga sakinah 1.2 Menanamkan dan membudayakan nilai-nilai keagamaan dan budaya di semua tingkat pendidikan 1.3 Peningkatan syiar-syiar Islam ditengah kehidupan masyarakat 1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaku pembina keagamaan 1.5 Penguatan institusi keagamaan	1 Semarak syiar agama di surau / mesjid dan ditengah masyarakat - Berkembangnya didikan subuh di 74 nagari - Berkembangnya wirid remaja mesjid di 74 nagari - Berkembangnya majleis taklim di 74 nagari
2	Revitalisasi niai-nilai budaya dan kelembagaan adat dalam kerangka "babaliak banagari"	2.1 Pengembalian penamaan nagari dan simbol-simbol nagari ke bentuk/bahasa aslinya 2.2 Penguatan peran Tungku Tigo Sajarangan- tali tigo sapilin dalam pelestarian nilai-nilai budaya, peningkatan kualitas kehidupan dan budaya masyarakat serta pembangunan daerah 2.3 Penguatan kelembagaan adat di setiap nagari 2.4 Mempertahankan nilai -nilai adat dan budaya Minang kabau	2 Menguatnya peran unsur tali tigo sapilin - Terlaksananya musyawarah tali tigo sapilin dalam rangka membahas persoalan-persoalan nagari, minimal 3 kali setahun di 74 nagari 3 Bertambahnya kader ulama/imam/khatib disetiap nagari (3 orang per nagari)

Agenda 3; Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Terpadu Berbasis Tekhnologi dan Pelestarian Lingkungan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
A	**Penataan Kebijakan strategis pengembangan ekonomi daerah**		
1	Penetapan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh	1.1 Penyiapan tata aturan rencana penataan dan pengembangan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh	1 Terwujud kawasan pertanian organik terpadu seluas 500 Ha
		1.2 Penyusunan rencana strategis pengembangan kawasan pertanian prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh sesuai lahan dan komodi secara terpadu (Renstra pertanian terpadu)	2 Tercapai swasembada pangan (daging dan ikan)
2	Pengelolaan Iklim Investasi Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah	**Ekonomi makro :**
B	**Peningkatan Produktifitas Sektor - sektor Ekonomi Daerah**		1 Menurunnya angka kemiskina dari 12% menjadi 6%
1	**Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan)**		2 Menurunnya angka pengangguran dari 7% menjadi 5,5 %
1.1.	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan mengoptimalkan pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi	1.1.1 Penyediaan dan pemasyarakatan bibit unggul bersertifikat	3 Meningkatnya produktifitas pertanian
		a Penyediaan bibit unggul padi sawah, hortikultura palawija dan buah - buahan tropis bersertifikat	- Produktifitas pertanian
		b Peningkatan populasi ternak di masyarakat sesuai kesepakatan dengan pemerintah Propinsi Sumbar	- Tanaman strategis lainnya (enau, tebu, jagung, markisa, karet, kopi dll)
		c Peningkatan produksi ikan	4 100% dokumen perencanaan pembangunan mempunyai KLHS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
		1.1.2 Peningkatan kualitas Kelembagaan dan SDM Pertanian	
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan, sekolah lapang, magang dan lain-lain	
		1.1.3 Pengembangan tekhnologi tepat guna bidang pertanian	
		a Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna	
		b Pemanfaatan tekhnologi informasi untuk pemasaran produk daerah	
		1.1.4 Pengendalian Hama dan Penyakit	
		a Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT) Pertanian	
		b Penanggulangan penyebaran penyakit menular pada hewan ternak dan peliharaan	

1	2	3	4
		c Pengendalian pupuk dan pestisida	
		1.1.5 Pemafaatan lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis	
		Optimalisasi Pemanfaatan Lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis	
1,2	**Kerjasama penelitian dan pengembangan tekhnologi pertanian**	1.2.1 Peningkatan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Lembaga dan Balai Penelitian serta kelompok tani	
		1.2.2 Kerjasama penelitian komoditi unggulan Kabupaten Solok	
2	**Industri Pengolahan dan UMKN**		
2.1	**Fasilitasi dan pemberdayaan UMKM**	2.1.1 Penguatan kelembagaan UMKM	
		Penguatan manajemen usaha dan fasilitasi perijinan	
		2.1.2 Promosi dan fasilitasi pemasaran produk UMKM	
		Fasilitasi Pengembangan pemasaran produk UMKM	
		2.1.3 Fasilitasi Permodalan UMKM	
		a Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM dengan dunia usaha b Peningkatan Jaringan kerja sama antar Pelaku UMKM c Penguatan kemampuan UMKM berbasis teknologi	
		2.1.4 Peningkatan kualitas SDM Pelaku UMKM	
		Pembinaan Pelaku UMKM.	
2.2	**Perlindungan dan jaminan usaha bagi pelaku industry dan pengolahan**	2.2.1 Bimbingan dan fasilitasi perolehan Hak Paten industri kecil mikro (IKM)	
		2.2.2 Fasilitasi pemerolehan register kesehatan dan sertifikat halal	
		2.2.3 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
3	**Pertambangan dan Energi**		
3.1	**Penataan Kawasan Pertambangan Rakyat Berwawasan Lingkungan**	3.1.1 Penyusunan dan Pengawasan PERDA Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	
		3.1.2 Pembinaan dan fasilitasi usaha pertambangan rakyat	
		3.1.3 Pengawasan aktifitas pertambangan di daerah	
3.2	**Penataan dan Pengawasan distribusi Minyak dan Gas**	3.2.1 Pengawasan pendistribusian minyak dan Gas	

1	2	3	4
3.3	**Pemenuhan ketersediaan Energi Listrik bagi masyarakat**	3.3.1 Pembangunan PLTMH, PLTS, Pico Hydro dan Lides	
3.4	**Energi Alternatif**	3.4.1 Pengembangan energi alternatif dan terbarukan	
4	**Perdagangan dan Jasa**		
4.1	**Peningkatan sentra usaha perdagangan masyarakat**	4.1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas pasar 4.1.2 Pembangunan pasar sentra kabupaten	
5	**Perhubungan dan transportasi**		
5.1	Peningkatan kualitas perhubungan dan transportasi	5.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan	
		5.1.2 Peningkatan kualitas jasa dan layanan transportasi	
6	**Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro**		
6.1	**Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro**	6.1.1 Menumbuhkembangkan Koperasi dan LKMN berbasis syariah	
C	**Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pertumbuhan Ekonomi**		
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis daerah	1.1 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya air lainnya	
		1.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten	
		1.3 Pembangunan dan peningkatan jalan ke sentra produksi pertanian	
D	**Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Angkatan Kerja**		
1.	**Penanggulangan masalah pengangguran dan pencari kerja**	1.1 Peningkatan kualitas tenaga kerja	
2	**Perlindungan ketenagakerjaan**	2.1 Perlindungan Hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan	
3	**Pembangunan ketransmigrasian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kawasan tidak layak huni**	3.1 Pengembangan resettlement transmigrasi lokal	
E	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**		
1	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	1.1 Pengendalian dan pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan	
2	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan	2.1 Pengawasan dan pengendalian pengrusakan hutan	

Agenda 4: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal , Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1	**Percepatan Pembangunan Nagari (Daerah) Tertinggal**		
1.1.	Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan penanggulangan kemiskinan	1.1.1 Pendataan dan pemetaan masyarakat miskin	1 Tuntas pengentasan 24 nagari tertinggal 2 Tersedia jaminan pelayanan sosial bagi 100 % penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
		1.1.2 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan nagari tertinggal	
1.2	Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Nagari tertinggal	1.2.1 Pembangunan jalan utama termasuk jembatan pada nagari – nagari tertinggal dan atau terisolir (jalan kabupaten maupun jalan lingkungan)	
		1.2.2 Pembangunan dan penataan pasar nagari daerah tertinggal	
		1.2.3 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di nagari tertinggal termasuk embung	
		1.2.4 Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat nagari tertinggal	
		1.2.5 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni pada daerah tertinggal	
		1.2.6 Penyediaan layanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan di daerah tertinggal	
2	**Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Keluarga/Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Sosial**		
2.1	Jaminan pemeliharan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi penduduk miskin	2.1.1 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan sosial, pendidikan, Kesehatan dan pelayanan lainnya bagi Penduduk Miskin	
2.2	Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	2.2.1 Penyediaan jaminan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial, orang cacat dan orang terlantar	
		2.2.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	
		2.2.3 Pembinaan penyandang masalah sosial, orang terlantar dan cacat	
		2.2.4 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Sosial	
3	**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin**		
3.1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	3.1.1 Peningkatan SDM	
		3.1.2 Penyediaan bantuan modal usaha (ventura dan natura)	
		3.1.3 Fasilitasi pemasaran	

Agenda 5; Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1	Memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal, informal dan non formal	1,1 Pengembangan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas, adil, merata dan terjangkau	1 Tercapai tuntas Wajar Dikdas Paripurna
		1,2 Pemantapan pencapaian tuntas wajib belajar pendidikan dasar	2 Terpenuhi 100 % SPM bidang pendidikan
		1,3 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan menengah	3 Persentase lulus SLTA diterima di Perguruan Tinggi Negeri : 10%
2	Mengembangkan pendidikan Non formal dan Informal di tengah masyarakat.	2,1 Penyelenggaraan program pemberantasan buta huruf	
		2,2 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi anak putus sekolah/WB Paket A, Paket B dan Paket C	
		2,3 Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	
		2,4 Peningkatan pemahaman siswa terhadap bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV / AIDS	
		2,5 Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	
		2,6 Pembinaan Lembaga Kursus	
		2,7 Pengembangan Bimbingan teknis perpustakaan umum, nagari dan taman bacaan masyarakat dan mesjid	
		2,8 Pemberdayaan perpustakaan daerah	
3	Peningkatan mutu daya saing dan relevansi pendidikan dengan menerapkan "pendidikan berkarakter" berbasis " potensi personal" pada "sekolah efektif"	3,1 Pengembangan kemampuan personal siswa	
		3.2 Pengembangan Sekolah Efektif	
		3.3. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu dan daya saing pendidikan	
		3.4 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.	
		3.5 Pembinaan manajemen sekolah	
		3.6 Kerjasama dg perguruan tinggi,organisasi profesi dan dunia usaha serta lembaga lainya dalam rangka peningkatan mutu, tenaga pendidik dan kependidikan	
4	Peningkatan peran serta semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	4,1 Pemberdayaan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat peduli pendidikan	

Agenda 6: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1.	**Peningaktan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan yang berkualitas merata adil dan terjangkau**	**1,1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dan keluarga berencana (KB)**	1 Tercapai 100 % target Millenium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan
		1.1.1 Pengadaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan KB 1.1.2 Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana dan daya tampung RSUD	2 Tercapai 100 % standar pelayanan minimal kesehatan 3 Terpenuhi 100 % persyaratan minimal RSUD type C
		1.2 Program Peningkatan Sediaan Farmasi (Obat dan Perbekalan Kesehatan serta keluarga berencana) Dan Makanan Minuman	
		1.2.1 Penyediaan Sediaan farmasi (obat dan perbekalan kesehatan) 1.2.2 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.2.3 Pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang sediaan farmasi dan makanan / minuman 1.2.4 Peningkatan pengawasan keamanan farmasi ,pangan dan bahan bebahaya 1.2.5 Pengembangan obat tradisional	
		1,3 Peningkatan Upaya Kesehatan dasar dan rujukan	
		1.3.1 Pemantapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin 1.3.2 Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu , Anak dan Kesehatan Reproduksi 1.3.3 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.3.4 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	

1	2	3	4
		1.3.5 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana	
		1.4 Upaya Peningkatan kecukupan dan kualitas gizi masyarakat	
		1.4.1 Peningkatan keberagaman konsumsi pangan untuk mencapai gizi seimbang 1.4.2 Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin essensial masyarakat 1.4.3 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang garam yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat besi mikro lainnya	
2	**Pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat**	**2,1 Promosi kesehatan dan pemberdayaaan masyarakat**	
		2.1.1 Peningkatan upaya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2.1.2 Pemberdayaan Upaya Kesehatan Kerja sektor Non Formal 2.1.3 Peningkatan kesiap siagaan masyarakat dalam penanggulanan kesehatan 2.1.4 Program keluarga berencana dan sejahtera	
3	**Peningkatan kualitas manajemen dan standar pelayanan kesehatan**	**3,1 Standarisasi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana**	
		3.1.1 Penyusunan dan Pengendalian Standar Pelayananan Minimal Kesehatan dan KB sesuai potensi dan kondisi daerah	
		3.2 Pengembangan, Peningkatan, Pemantapan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan	
		3.2.1 Pengembangan Sistem informasi kesehatan dan KB 3.2.2 Penyebarluasan data dan informasi pembangunan kesehatan	
4	**Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat, kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial**	**4,1 Pengendalian pencemaran kualitas lingkungan**	
		4.1.1 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan 4.1.2 Penyehatan Lingkungan 4.1.3 Pembangunan air bersih dan sanitasi	

Agenda 7; Pengembangan Kepariwisataan dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Kabupaten Solok menjadi destinasi (tujuan) wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat	1.1 Pengembangan Kawasan Wisata secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat 1.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan 1.3 Pensinergian pengembangan kepariwisataan dengan sektor budaya, industri dan pertanian	Tercapai Kabupaten Solok sebagai Destinasi wisata unggulan kawasan sumatera : 1 Kunjungan wisatawan nusantara meningkat 60 % dari tahun 2010 2 Wisata mancanegara meningkat 50 % dari tahun 2010
2	Pembinaan masyarakat sadar wisata	2.1 Pembinaan Manajemen Kepariwisataan bagi pelaku/pengelola wisata lokal dan masyarakat sekitar objek wisata	
3	Pelestarian Nilai dan Kekayaan Budaya Daerah	3.1 Pembinaan terhadap kelompok-kelompok pelestarian budaya daerah 3.2 Pelestarian dokumentasi, peninggalan budaya dan benda bersejarah lainnya 3.3 Penyusunan/Pencetakan Buku Sejarah/Tambo Nagari	

Agenda 8: Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2015
1	2	3	4
1	Pembinaan kepemudaan	1.1 Pembinaan organisasi kepemudaan 1.2 Pengembangan pemuda pelopor, mandiri dan berprestasi	1 Berkembang kelompok pemuda produktif dan mandiri di 14 Kecamatan 2 Masuk lima besar dalam Porprov Sumatera Barat
2	Peningkatan prestasi olah raga	2.1 Pemberdayaan KONI 2.2 Penyelenggaraan kompetisi reguler secara rutin	3 Makin baik angka pembangunan gender yang ditunjukkan dengan Indek Pembangunan Gender (IPG) sebesar 55
3	Pemberdayaan perempuan	3.1 Perlindungan perempuan terhadap KDRT 3.2 Peningkatan sumber daya perempuan dalam kemandirian ekonomi 3.3 Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan gender	

BAB VIII
MATRIK
RINCIAN DAN TARGET TAHUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015

Agenda 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Reformasi Tata Kelola dan Tata Laksana Administrasi Pemerintahan**												
1.1	Penataan Organisasi dan beban Kerja	1.1.1 Penataan organisasi perangkat Daerah	Berfungsinya organisasi perangkat Daerah secara lebih efektif dengan span of control yang berada pada kondisi ideal	1 Terlaksananya evaluasi berkala organisasi perangkat daerah	2 kali	1	-	1	-	-	Setda, BKD, DPPKA, DPRD,	150.000.000	APBD Kab
				2 Tersedianya paket regulasi dan sistem penempatan, pola peningkatan karir dan distribusi aparatur sesuai beban kerja, kompetensi dan kebutuhan strategis daerah	2 Paket	1	1	-	-	-	Setda, BKD	500.000.000	APBD Kab
		1.1.2 Penilaian kinerja secara berkala	Meningkatnya motivasi kinerja SKPD beserta aparaturnya	1 Semua SKPD mempunyai kinerja minimal "baik"	5 kali	1	1	1	1	1	Setda	250.000.000	APBD Kab
1.2	Penataan sistem administrasi dan tata laksana (tata kerja) pemerintahan	1.2.1 Peninjauan instrument hukum (Perda/Perbub) tata kerja dan tata laksana pemerintahan dan pengendalian pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) serta penyusunan Prolegda sampai 2015	Tersedia instrumen hukum yang lebih akomodatif, responsif, dan aplikatif	Terlaksananya analisis dan penyempurnaan instrumen hukum (perda dan perbup yang diundangkan sebelum tahun 2011) dan tersusunnya Prolegda sampai 2015	20 paket	10	10	-	-	-	Setda, DPRD	2.800.000.000	APBD Kab
		1.2.2 Penataan rentang kendali dan pendelegasian kewenangan/ urusan pemerintahan.	Efektifnya penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 Terlaksananya evaluasi pendelegasian kewenangan/urusan kepada kecamatan dan nagari	2 paket	2	-	-	-	-	Setda	50.000.000	APBD Kab
				2 Terlaksananya evaluasi pendelegasian kewenangan/ urusan tentang pelayanan dan perizinan	2 paket	1	-	1	-	-	Setda, KP3M, Dinas Kependudukan dan Capil	50.000.000	APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.2.3 Penyusunan SPM dan SOP	Tersedianya SPM dan SOP dalam pelayanan publik dan pelayanan administrasi	Persentase SKPD yang memiliki SPM dan SOP	%	100	100	100	100	100	Seluruh SKPD	350.000.000	APBD Kab
		1.2.4 Pengawasan dan pengendalian kebijakan SPM dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya kualitas pengelolaan pelayanan publik maupun aparatur sesuai dengan SPM dan SOP yang telah ditetapkan	1 Indikator Kepuasan publik/aparatur terhadap pelayanan dan pengelolaan administrasi di setiap SKPD	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	Seluruh SKPD terkait pelayanan publik	600.000.000	APBD Kab
				2 Diperolehnya ISO pada unit kerja pelayanan publik.	2	-	-	1	1	-	KP3M, Dinas Kependudukan dan Capil	500.000.000	APBD Kab
1.3	Penataan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah	1.3.1 Penyusunan Sistem dan prosedur serta standar pelayanan minimal (SPM) Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah	Tercapainya opini terbaik atas audit pengelolaan keuangan dan asset daerah.	1 Persentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	100%	75	85	95	100	100	DPPKA, Inspektorat	250.000.000	APBD Kab
				2 Persentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan asset daerah	100%	75	85	95	100	100	DPPKA, Inspektorat	250.000.000	APBD Kab
		1.3.2 Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan asset daerah pada setiap SKPD dan unit kerja	makin tertib Pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai SPM dan SOP	Terlaksana upaya peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan dan asset di SKPD melalui pelatihan, bimtek, kursus dll	500 org	250	-	250	-	-	DPPKA	5.000.000.000	APBD Kab
		1.3.3 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan, penatausahaan keuangan dan asset daerah	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Terlaksananya pengawasan, pembinaan dan tindak lanjut penyimpangan akibat kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di semua SKPD	500 Obrik	100	100	100	100	100	DPPKA, Inspektorat	4.000.000.000	APBD Kab
1.4	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1.4.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tercapai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 70 % selama 5 tahun	70%	10	15	15	15	15	DPPKA	7.500.000.000	APBD Kab
1.5	Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas SDM pejabat dan Aparatur Pemerintah	1.5.1 Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas pejabat dan SDM Aparatur Pemerintah	Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pejabat dan SDM aparatur Pemerintah	Terlaksana peningkatan SDM aparatur melalui Pendidikan, pelatihan dan pembinaan Aparatur baik secara formal, informal maupun non formal sesuai kebutuhan daerah	20%	4	4	4	4	4	Seluruh SKPD	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
2	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Aparatur dan Pemerintah**												
2.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.1.1 Membangun Sistem dan manajemen unit pelayanan dan pengaduan masyarakat on-line dan off-line.	Makin baiknya kualitas pelayanan, adil dan merata dengan teknologi informasi	Tersedianya sistem dan manajemen unit layanan dan pengaduan masyarakat on-line dan off-line.	1 paket	1	-	-	-	-	Setda, KP3M, Dinas Perhubungan dan kominfo	250.000.000	APBN, APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.1.2 Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Makin baiknya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil di 14 kecamatan dan 74 nagari	1 Terlaksana sistem pengadministrasian kependudukan dengan sistem teknologi informasi di 14 kecamatan	Kec	2	3	3	3	4	Setda, Dinas Kependudukan dan Capil	4.000.000.000	APBN, APBD Kab
				2 Terlaksana kerjasama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat dalam mengatur masalah-masalah administrasi kependudukan	Keg / tahun	1	1	1	1	1	Setda, Dinas Kependudukan dan Capil	1.000.000.000	APBN, APBD Kab
2.2	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	2.2.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Tercapai Persentase pegawai yang merasa puas terhadap pelayanan aparatur	90%	90	90	90	90	90	BKD	500.000.000	APBD Kab
		2.2.2 Peningkatan jaminan kesejahteraan pejabat dan aparatur	Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi pejabat dan aparatur	Terfasilitasinya pegawai untuk mendapatkan kebutuhan pokok minimumnya yang meliputi ; perumahan, kesehatan keluarga, pendidikan anak dan jaminan hari tua serta penghargaan atas pengabdian.	5 paket	1	1	1	1	1	BKD	2.000.000.000	APBD Kab
2.3	Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan	2.3.1 Penataan kawasan ibukota	Terwujud kawasan ibukota sebagai pusat pemerintahan yang representatif sesuai Core Ibukota	1 Tersusunnya dokumen penataan kawasan ibukota kabupaten yang representatif sesuai Core Ibukota	2 Paket	1	1	-	-	-	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum	1.000.000.000	APBD Kab
				2 Terlaksana pengembangan kawasan ibukota kabupaten	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum	20.000.000.000	APBD Kab
		2.3.2 Penataan kawasan kecamatan	Tertatanya wilayah kecamatan yang sesuai dengan kaedah-kaedah tata ruang dan kondisi-kondisi faktual saat ini	Tersusunnya dokumen tata ruang kecamatan berdasarkan skala prioritas sebagaimana diamanatkan Perda RTRW	28 paket	-	7	7	7	7	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum	2.800.000.000	APBD Kab
		2.3.3 Penataan aturan mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana.	Tersedia regulasi Mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana.	Tersusunnya panduan Mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana.	1 paket	-	1	-	-	-	BPBD	50.000.000	APBD Kab
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menghadapi mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana.	Terbentuk dan berdayanya organisasi pemuda siaga bencana (tagana)	74 nagari	25	25	24	-	-	BPBD, Dinas Sosnakertrans	740.000.000	APBN,APBD Prop, APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Adanya sarana-prasarana pendukung mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana.	Terbangunnya/tersediannya sarana-prasarana pendukung mitigasi, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi bencana dari kondisi 20% menjadi 100%	80%	-	20	20	20	20	BPBD, Dinas Sosnakertrans, Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan	50.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.3.4 Pembangunan kantor pemerintahan	Tersedianya gedung kantor yang representatif dan fasilitas umum yang memiliki nilai estetika sebagai *land mark* daerah	Terlaksananya pembangunan kantor dan fasilitas umum sebagai sarana pelayanan yang representatif pada :									
				a tingkat kabupaten	5 unit	1	1	1	1	1	Dinas Pekerjaan Umum	29.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b tingkat kecamatan	10 paket	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c tingkat nagari	30 nagari	6	6	6	6	6	Setda	7.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.3.5 Penyediaan sarana peningkatan dan pengendalian mutu dan kualitas pembangunan infrastruktur	Terjaminnya kualitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah	Tersedia sarana penunjang pelaksanaan pembangunan dan pengendalian mutu pekerjaan pembangunan infrastruktur	2 Paket	1	1	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
3	**Koordinasi & Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan**												
3.1	Peningkatan koordinasi dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan	3.1.1 Koordinanasi Perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Semakin baik dan makin terkoordinirnya Perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya / adanya dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat sasaran, terpadu dan sinergis	5 Tahun	1	1	1	1	1	Setda, Bappeda, DPRD, Kecamatan	75.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.1.2 Pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Makin efektif dan efisiennya Perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Minimalnya tingkat penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	5 Tahun	1	1	1	1	1	Setda, Bappeda, Inspektorat, DPRD, Kecamatan	15.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
4	**Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**												
4.1	Transparansi data dan informasi daerah berbasis tekhnologi informasi	4.1.1 Pelaksanaan transparansi penyelenggaraan pemerintahan termasuk di bidang keuangan daerah.	Makin baiknya pelaksanaan transparansi penyelenggaraan pemerintahan termasuk di bidang keuangan (penganggaran dan pertanggungjawaban)	1 Adanya publikasi-publikasi kebijakan pemerintah daerah termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui media cetak dan elektronik (portal website)	5 paket	1	1	1	1	1	Setda, Dinas Perhubungan dan kominfo	500.000.000	APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				2 adanya komunikasi dialogis antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan DPRD melalui dialog, audiensi dll.	5 paket	1	1	1	1	1	DPRD, Setda	7.000.000.000	APBD Kab
		4.1.2 Pembangunan sistem tekhnologi sistem informasi pembangunan daerah (E-Government)	Menjadikan kawasan ibukota sebagai cyber city	Terlaksana pembangunan kawasan arosuka cyber city	2 paket	1	1	-	-	-	Setda, Bappeda, Dinas Perhubungan dan kominfo	600.000.000	APBD Kab
			Tersedia sistem tekhnologi informasi daerah yang terpadu	Terlaksananya pembangunan jaringan Tekhnologi Informasi ke 14 Kecamatan	14 Kec	-	2	4	4	4	Dinas Perhubungan dan kominfo	2.800.000.000	APBD Kab
4.2	Peningkatan partisipasi masyarakat	4.2.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan	Semakin tinggi rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerah	Terlaksana program peningkatan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang, dialog, audiensi dan lain-lain terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	5 Keg/tahun	1	1	1	1	1	Setda, Bappeda, Kecamatan	500.000.000	APBD Kab
5.	**Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Rasa Cinta Tanah Air**												
5.1.	Pembinaan kehidupan berbangsa dan berpolitik serta pengembangan rasa solidaritas masyarakat	5.1.1 Pemantapan wawasan kebangsaan bagi ormas, orsos, OKP , organisasi keagamaan dll	Meningkatnya rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan masyarakat	Terlaksananya upaya pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi untuk menghindari / antisipasi konflik horizontal di tengah masyarakat	14 Kec	14	14	14	14	14	Setda, Kantor Kesbangpol, Kantor Satpol PP	1.000.000.000	APBD Kab
			Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap ajaran-ajaran terlarang, aliran-aliran ekstrim dan peredaran NAPZA	Terlaksana upaya antisipasi terhadap ajaran-ajaran terlarang, aliran-aliran ekstrim dan peredaran NAPZA	5 Paket	1	1	1	1	1	Setda, Kantor Kesbangpol, BNK	5.000.000.000	
		5.1.2 Pembinaan kehidupan berpolitik	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam kerangka NKRI	1 Persentase partisipasi aktif masyarakat dalam pesta demokrasi pada tahun 2014 dan 2015	≥70%	-	-	-	≥70	≥70	Setda, Kantor Kesbangpol, KPU/Panwas	500.000.000	APBD Kab
				2 Tidak adanya konflik horizontal akibat perbedaan pandangan politik yang membahayakan dan menganggu kehidupan masyarakat	5 Tahun	-	1	1	1	1	Setda, Kantor Kesbangpol, Kecamatan, Nagari, KPU/Panwas	400.000.000	APBD Kab
		5.1.3 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan trantibmas	Terciptanya suasana kondusif ditengah-tengah kehidupan masyarakat	Terlaksana peningkatan peran masyarakat dalam pengamanan lingkungan	14 kec	14	14	14	14	14	Setda, Kantor Kesbangpol, Kecamatan, Nagari	400.000.000	APBD Kab
	JUMLAH											**265.290.000.000**	

Agenda 2: Penataan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya sesuai falsafah ABS-SBK

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat.	1,1 Pembinaan keluarga sakinah	Meningkatnya pemahaman keluarga sakinah	Terbinanya keluarga Sakinah dan keluarga harapan	5000 Keluarga	1000	1000	1000	1000	1000	Setda, BKBPP, Dinas Kesehatan, Disosnakertrans, Kemenag	100.000.000	APBN, APBD Prop APBD Kab
		1,2 Menanamkan dan membudayakan nilai-nilai keagamaan dan budaya di semua tingkat pendidikan	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan pada setiap jenjang pendidikan	Tercapai persentase sekolah yang membudayakan nilai-nilai ibadah dan budaya daerah	100%	100	100	100	100	100	Setda dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	100.000.000	APBN, APBD Prop APBD Kab
		1,3 Peningkatan syiar-syiar Islam ditengah kehidupan masyarakat	Makin baiknya pengamalan nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat	Semarak dan makin berkembangnya aktifitas keagamaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat	74 Nagari	74	74	74	74	74	Setda, Kemenag	500.000.000	APBN, APBD Prop APBD Kab
		1,4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaku pembina keagamaan	Meningkatnya kualitas, kesejahteraan dan jumlah pelaku pembina keagamaan	1 Terlaksananya pembinaan terhadap Imam, Khatib, gharin dan guru mengaji	10000 org	2000	2000	2000	2000	2000	Setda, Kemenag	11.000.000.000	APBN, APBD Prop APBD Kab
				2 Bertambahnya kader mubalig, imam, khatib dan guru mengaji kerjasama dengan pesantren di setiap nagari (3 orang/nagari selama 5 tahun)	222	74	148	222	148	74	Setda, Kemenag	5.550.000.000	APBN, APBD Prop APBD Kab
		1,5 Penguatan institusi keagamaan	Meningkatnya peran lembaga keagamaan dalam membentengi umat	1 Terlaksana Kerjasama pembinaan Madrasah dan Rumah Ibadah dengan sekolah formal	390 paket	74	74	74	74	74	Setda, Kemenag	100.000.000	APBN, APBD Kab, masyarakat
				2 Terlaksana Pembinaan rumah ibadah	390 paket di 74 Nagari	74	74	74	74	74	Setda, Kemenag	300.000.000	
2	Revitalisasi niai-nilai budaya dan kelembagaan adat dalam kerangka "babaliak banagari"	2,1 Pengembalian penamaan nagari dan simbol-simbol nagari ke bentuk/bahasa aslinya	Kembalinya penamaan nagari dan simbol-simbol nagari ke bentuk/bahasa aslinya	Terlaksana pengembalian penamaan nagari dan simbol-simbol nagari kepada bentuk/ bahasa aslinya	100%	20	50	30	-	-	Setda, Dinas Pariwisata dan Budaya	100.000.000	APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2,2 Penguatan peran Tungku Tigo Sajarangan- tali tigo sapilin dalam pelestarian nilai-nilai budaya, peningkatan kualitas kehidupan dan budaya masyarakat serta pembangunan daerah	Meningkatnya peran Tungku Tigo Sajarangan- tali tigo sapilin dalam pelestarian nilai-nilai budaya, peningkatan kualitas kehidupan dan budaya masyarakat serta pembangunan daerah	Terlaksananya ajang silaturahmi forum tungku tigo sajarangan dalam mendukung pembangunan masyarakat dan nagari di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten	Nagari / Kecamatan / Kabupaten	1	1	1	1	1	Setda, Kecamatan	250.000.000	APBD Kab, swadaya masyarakat
		2,3 Penguatan kelembagaan adat di setiap nagari	Menguatnya peran kelembagaan adat nagari dalam mengayomi kehidupan sosial masyarakat	1 Terlaksananya pembinaan kelembagaan adat nagari (LKAAM, KAN,Bundo Kanduang)	10 kali	2	2	2	2	2	Setda, Dinas Pariwisata dan Budaya	500.000.000	APBD Kab
				2 Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan adat nagari yang representatif	74 Nagari	15	15	15	15	14	Dinas Pariwisata dan Budaya	3.700.000.000	APBD Prop dan APBD Kab
		2,4 Mempertahankan nilai -nilai adat dan budaya Minang kabau	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai adat dan budaya Minang Kabau	Terlaksananya upaya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya minang kabau melalui forum-forum resmi (seminar, lokakarya, dialog, dll)	10 kali	2	2	2	2	2	Dinas Pariwisata dan Budaya , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	500.000.000	APBD Kab
			Meningkatnya pemahaman remaja terhadap nilai-nilai adat dan budaya minang kabau	Terlaksananya pembinaan remaja dalam pemahaman nilai-nilai adat dan budaya minang kabau	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Budaya, Kemenag	250.000.000	APBD Kab
		JUMLAH										**22.950.000.000**	

Agenda 3: Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Terpadu Berbasis Teknologi dan Pelestarian Lingkungan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**Penataan Kebijakan strategis pengembangan ekonomi daerah**												
1	Penataan dan pengembangan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh	1,1 Penyiapan tata aturan rencana penataan dan pengembangan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh	Terkendali pengembangan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh di wilayah Kabupaten Solok	Tersedianya tata aturan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh (kawasan arosuka dan kawasan singkarak)	1 Paket	1	-	-	-	-	Bappeda	100.000.000	APBD Kab
		1,2 Penyusunan rencana strategis pengembangan kawasan pertanian prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh sesuai lahan dan komodi secara terpadu (Renstra pertanian terpadu)	Terkendalinya pengembangan kawasan prioritas dan kawasan potensial / cepat tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kawasan prioritas dan kawasan potensial /cepat tumbuh : 1 Sentra Produksi Beras dan Tanaman Pangan 2 Sentra Produksi Buah-buahan Tropis 3 Sentra Produksi Hortikultura 4 Peternakan dan Perikanan 5 Pariwisata Agro 6 Pertanian Organik	2 Paket	1	1	-	-	-	Bappeda, SKPD terkait	200.000.000	APBD Kab
2	Pengelolaan Iklim Investasi Daerah	Peningkatan iklim investasi daerah	Meningkatnya kenyamanan / daya tarik berinvestasi di Kabupaten Solok	Tersedia aturan dan sistem yang menjamin kenyamanan berinvestasi	1 Paket	-	1	-	-	-	Setda / SKPD terkait	100.000.000	APBD Kab
B	**Peningkatan Produktifitas Sektor - sektor Ekonomi Daerah**												
1	**Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan)**												
1.1.	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dengan mengoptimalkan pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi	1.1.1 Penyediaan dan pemasyarakatan bibit unggul bersertifikat											
		a Penyediaan bibit unggul padi sawah, hortikultura palawija dan buah - buahan tropis bersertifikat	Terpenuhinya ketersediaan bibit unggul bersertifikat pada komoditas padi, hortikultura, palawija dan buah-buahan tropis	Tersedianya bibit unggul bersertifikat :									
				1 Padi Sawah bersertifikat	1000 ton	200	200	200	200	200	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	125.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Penangkaran padi sawah dan palawija	500 Ha	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Hortikultura	500 Ha	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4 Bio Farmaka	56 Ha	-	14	14	14	14	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	560.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Enau	25 Ha	1	3	6	7	8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Tebu	200 Ha	30	50	60	30	30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Bibit Kehutanan	388.000 batang	77600	77600	77600	77600	77600	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.280.400.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				8 Perkebunan strategis (Coklat/kakao, cengkeh, karet, kopi arabika dan lain - lain)	500 Ha	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		b Peningkatan populasi ternak di masyarakat sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi Sumbar	Terwujudnya swasembada daging di Kabupaten Solok	Tercapai penambahan populasi :									
				1 Sapi	13.500 ekor	2700	2700	2700	2700	2700	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 kambing	7.500 ekor	1500	1500	1500	1500	1500	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Unggas	250.000 Ekor	50000	50000	50000	50000	50000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	450.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		c Peningkatan produksi ikan	Meningkatnya produksi perikanan sesuai MoU Bupati Solok dengan Menteri Perikanan dan Kelautan dan Pemprop Sumbar	Tercapainya target produksi ikan pada tahun 2015 sebesar 1.872,5 ton secara bertahap	1.872,5 Ton	769,15	969,15	1269,15	1569,15	1872,5	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	435.000.000	APBN dan APBD Kab
		1.1.2 Peningkatan kualitas Kelembagaan dan SDM Pertanian											
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan, sekolah lapang, magang dan lain-lain	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	Terlaksana pembinaan kelompok tani melalui Penyuluhan, sekolah lapang, magang dan lain-lain	500 Kelompok	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.1.3 Pengembangan tekhnologi tepat guna bidang pertanian											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna	Meningkatnya mutu dan hasil produksi pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa	Terlaksananya penerapan dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna untuk peningkatan nilai tambah ekonomi produksi masyarakat	5 Paket	1	1	1	1	1	BPM, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Koperindag & UMKM	1.700.000.000	Pertanian, Perkebunan, BM, Koperindag
		b Pemanfaatan tekhnologi informasi untuk pemasaran produk daerah	Terlindunginya petani dalam pemasaran hasil produksi pertanian	Tersedia informasi pasar dengan memanfaatkan tekhnologi informasi secara teratur kepada petani	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Koperindag & UMKM	250.000.000	APBN
		1.1.4 Pengendalian Hama dan Penyakit											
		a Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT) Pertanian	Terjaminnya mutu produk hasil pertanian	Terlaksana pengendalian serangan OPT pada produksi pertanian di semua kecamatan	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,	300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		b Penanggulangan penyebaran penyakit menular pada hewan ternak dan peliharaan	Terkendalinya penyebaran penyakit hewan menular (SE dan Flu Burung)	Terkendalinya angka kejadian kasus Flu Burung (sejenis lainnya) dan Septicainea Evizootica (SE) ≤ 5 kasus di 14 Kecamatan	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	500.000.000	APBD Kab
		c Pengendalian pupuk dan pestisida	Terkoordinirnya distribusi pupuk dan pestisida	1 Tidak terjadi kelangkaan pupuk di 14 Kecamatan	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Setda, Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terkendalinya pemakaian pestisida di 14 Kecamatan	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Setda, Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan,	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.1.5 Pemafaatan lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis											
		Optimalisasi Pemanfaatan Lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis	Meningkatnya pemanfaatan lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis 20%	Terlaksana pemanfaatan lahan marginal, lahan terlantar dan lahan kritis untuk perkebunan dan pertanian seluas 1800 Ha	1800 Ha	360	360	360	360	360	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1,2	**Kerjasama penelitian dan pengembangan tekhnologi pertanian**	1.2.1 Peningkatan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Lembaga dan Balai Penelitian serta kelompok tani	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian pertanian	Terselenggara kerjasama dan desiminasi hasil - hasil penelitian	5 kali	1	1	1	1	1	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.2 Kerjasama penelitian komoditi unggulan Kabupaten Solok	Meningkatnya kualitas dan kuantitas komoditi unggulan Kabupaten Solok	Terlaksana penelitian dan pengembangan komoditas unggulan pertanian	10 komoditi	2	2	2	2	2	Bappeda, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
2	**Industri Pengolahan dan UMKN**												
2.1	**Fasilitasi dan pemberdayaan UMKM**	2.1.1 Penguatan kelembagaan UMKM											
		Penguatan manajemen usaha dan fasilitasi perizinan	Meningkatnya jumlah industri Kecil Menengah yang sehat	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam penguatan manajemen usaha dan pengurusan izin	4.400 UMKM	800	900	900	900	900	Dinas Koperindag, UMKM, KP3M	250.000.000	APBD Kab, APBI
		2.1.2 Promosi dan fasilitasi pemasaran produk UMKM											
		Fasilitasi Pengembangan pemasaran produk UMKM	Terlaksananya pengembangan usaha Kecil dan menengah	1 Terlaksana pembangunan / penciptaan akses jaringan pemasaran produk UMKM secara kontiniu dengan pusat perbelanjaan atau sentra oleh-oleh / cenderamata	20 UKM	4	4	4	4	4	Dinas Koperindag & UMKM	200.000.000	APBD Kab
				2 Terfasilitasinya promosi produk UMKM melalui berbagai media	50 UKM	10	10	10	10	10	Dinas Koperindag & UMKM	375.000.000	APBD Kab
		2.1.3 Fasilitasi Permodalan UMKM											
		a Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM dengan dunia usaha	Terwujudnya kemitraan UMKM dengan BUMN dan Lembaga keuangan lainnya	Terlaksana fasilitasi kerja sama UMKM dengan BUMN / Lembaga Keuangan/ perusahaan swasta	200 UMKM	40	60	60	20	20	Dinas Koperindag & UMKM	100.000.000	APBD Kab
		b Peningkatan Jaringan kerja sama antar Pelaku UMKM	Terwujudnya Jaringan kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM	Terbentuknya forum/asosiasi /organisasi antar pelaku UMKM	10 organisasi/ lembaga/ asosiasi	2	2	2	2	2	Dinas Koperindag & UMKM	150.000.000	APBD Kab
		c Penguatan kemampuan UMKM berbasis teknologi	Berkembangnya UMKM berbasis teknologi	Terfasilitasinya peningkatan kapasitas penggunaan tekhnologi bagi UMKM	10 Paket	2	2	2	2	2	Dinas Koperindag & UMKM	600.000.000	APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.1.4 Peningkatan kualitas SDM Pelaku UMKM											
		Pembinaan Pelaku UMKM.	Meningkatkan SDM bagi Pelaku UMKM.	Terlaksananya pembinaan SDM Pelaku yang mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan magang dll	200 UMKM	40	40	40	40	40	Dinas Koperindag & UMKM	200.000.000	APBD Kab
2.2	**Perlindungan dan jaminan usaha bagi pelaku industri dan pengolahan**	2.2.1 Bimbingan dan fasilitasi perolehan Hak Paten industri kecil menengah (IKM)	Diperoleh Hak Paten terhadap produk IKM	Terfasilitasi IKM memperoleh Hak paten	5 Hak Paten	1	1	1	1	1	Dinas Koperindag & UMKM, Dinas Kesehatan	250.000.000	APBD Kab
		2.2.2 Fasilitasi pemerolehan register kesehatan dan sertifikat halal	Meningkatnya nilai keamanan produk IKM	Terfasilitasi UMKM memperoleh register kesehatan dan sertifikat halal	50	10	10	10	10	10	Dinas Koperindag & UMKM, Dinas Kesehatan	350.000.000	APBD Kab
		2.2.3 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang dan jasa atas produk /barang tanpa Label, tidak sesuai SNI, Kadaluarsa sesuai UU No. 8 Tahun 1999 Ttg Perlindungan Konsumen	Terlaksana pengawasan dan terkontrolnya peredaran barang dan jasa di masyarakat sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Dinas Koperindag & UMKM	250.000.000	APBD Kab
3	**Pertambangan dan Energi**												
3.1.	**Penataan Kawasan Pertambangan Rakyat Berwawasan Lingkungan**	3.1.1 Penyusunan dan Pengawasan PERDA Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	Terkendalinya aktivitas pertambangan rakyat di daerah Kabupaten Solok	Terlaksananya penyusunan regulasi dan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Paket	1	-	-	-	-	Dinas Pertambangan dan Energi	75.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.1.2 Pembinaan dan fasilitasi usaha pertambangan rakyat	Meningkatnya profesionalitas penambang baik dari segi teknis dan manajemen	Makin baiknya kesejahteraan rakyat penambang diwilayah Kabupaten Solok	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Dinas Pertambangan dan Energi	1.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.1.3 Pengawasan aktifitas pertambangan di daerah	Terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar (good mining practise) di Kabupaten Solok	Terkendalinya aktivitas pertambangan di daerah sesuai dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Dinas Pertambangan dan Energi, Kantor Lingk. Hidup	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
3,2	**Penataan dan Pengawasan distribusi Minyak dan Gas**	3.2.1 Pengawasan pendistribusian minyak dan Gas	Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas di masyarakat	Terpenuhinya kuota pendistribusian minyak dan gas di Kabupaten Solok	14 Kecamatan	14	14	14	14	14	Dinas Pertambangan dan Energi	300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
3,3	**Pemenuhan Ketersediaan Energi Listrik bagi Masyarakat**	3.3.1 Pembangunan PLTMH, PLTS, Pico Hydro dan Lides	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat melalui program kelistrikan	Meningkatnya persentase rumah tangga terlayani listrik dari 82 % menjadi 90%	8%	2	2	2	1	1	Dinas Pertambangan dan Energi	17.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3,4	**Energi Alternatif**	3.4.1 Pengembangan energi alternatif dan terbarukan	Tersedianya kajian pengembangan energi alternatif dan terbarukan	Terlaksananya studi kelayakan pengembangan energi alternatif dan terbarukan	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pertambangan dan Energi	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
4	**Perdagangan dan Jasa**												
4.1.	**Peningkatan Sentra Usaha Perdagangan Masyarakat**	4.1.1 Peningkatan kapasitas dan kualitas pasar	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Pasar A	Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar A di 14 Nagari	14 Pasar Nagari	2	2	4	3	3	Dinas Koperindag & UMKM, Dinas Pekerjaan umum	27.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas Pasar B	Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar B pada 3 Pasar Serikat	3 Pasar Serikat	-	-	1	1	1	Dinas Koperindag & UMKM, Dinas Pekerjaan umum	15.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas pasar khusus	Terpenuhinya sarana dan prasarana pasar khusus (Pasar sayur, pasar ternak, pasar agropolitan)	5 paket	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperindag & UMKM	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		4.1.2 Pembangunan pasar sentra kabupaten	Terdukungnya kawasan ibukota (arosuka) sebagai pusat kegiatan lokal (PKL)	Terbangunnya pasar ibukota kabupaten	1 Unit	-	-	-	1	-	Dinas Koperindag & UMKM, Dinas Pekerjaan umum	15.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
5	**Perhubungan dan Transportasi**												
5.1	Peningkatan kualitas perhubungan dan transportasi	5.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan	Lancar dan tertibnya arus lalu lintas barang dan jasa	Terlaksana penyediaan kebutuhan rambu - rambu dan pengamanan jalan pada jalur padat dan jalur utama	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan dan Kominfo	1.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		5.1.2 Peningkatan kualitas jasa dan layanan transportasi	Meningkatnya kualitas jasa dan layanan transportasi	Terlaksana pembinaan disiplin dan perilaku pengemudi dan pengusaha jasa transportasi melalui kegiatan khusus	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan dan Kominfo	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
6	**Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro**												
6.1	**Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro**	6.1.1 Menumbuhkembangkan Koperasi dan LKMN berbasis syariah	Tumbuhkembangnya koperasi dan LKMN dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat	1 Meningkatnya persentase koperasi yang melaksanakan RAT dari 60% menjadi 80%	20%	4	4	4	4	4	Dinas Koperindag & UMKM	1.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terbentuknya LKMN pada setiap nagari	74 Nagari	45	5	10	7	7	BPM, Dinas Koperindag & UMKM	740.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
C	**Pembangunan Infrastruktur Pendukung Pertumbuhan Ekonomi**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur strategis daerah	1,1 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya air lainnya	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk lahan pertanian dari 55% menjadi 70%	1 Terlaksana rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 8.481 Ha	8481 Ha	1768,2	1768,2	1768,2	1768,2	1768,2	Dinas Pekerjaan Umum	70.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terlaksana Operasi Jaringan irigasi 40 Daerah Irigasi (DI)	40 DI	8	8	8	8	8			
				3 Terlaksana rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung 11 buah	11 buah	2	2	2	2	3			
				4 Terlaksana rehabilitasi Sungai dan danau 12 buah	12 buah	2	3	2	3	2			
				5 Terlaksana rehabilitasi JITUT seluas 6000 Ha	6000 Ha	1200	1200	1200	1200	1200	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	6.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Terlaksana rehabilitasi JIDES seluas 11.000 Ha	11000 Ha	2000	2000	2000	2500	2500	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	13.750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Terbangunnya kincir air untuk pengairan sebanyak 8 unit	8 Unit	3	2	1	1	1	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				8 Terpelihara / terbangunnya pompanisasi untuk pengairan sebanyak 15 unit	15 Unit	3	2	4	4	2	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	450.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				9 terlaksana pembangunan Irigasi tanah dangkal	5 Unit	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1,2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Meningkatnya kondisi jalan / mantap dari 58,9% menjadi 67,59%	Terlaksana pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten							Dinas Pekerjaan Umum	230.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				1 Pembangunan / Peningkatan Jalan	120 KM	24	24	24	24	24			
				2 Pembangunan / peningkatan Jembatan	20 unit	4	4	4	4	4			
				3 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	1000 KM	200	200	200	200	200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4 Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan	50 unit	10	10	10	10	10			
		1,3 Pembangunan dan peningkatan jalan ke sentra produksi pertanian	Memperlancar pengangkutan hasil pertanian dari sentra produksi ke Jalan Kabupaten	1 Terbangunnya dan terpeliharanya jalan usaha tani	25 Km	5	5	5	5	5	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terbangunnya dan terpeliharanya jalan produksi	34 km	10	8	6	5	5	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	3.400.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
D	**Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Angkatan Kerja dan Pembangunan Ketransmigrasian**												
1.	**Penanggulangan masalah pengangguran dan pencari kerja**	1.1 Peningkatan kualitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	1 Terselenggara peningkatan kualitas SDM tenaga kerja	250 org	50	50	50	50	50	Dinas Sosnakertrans	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terpenuhinya fasilitas BLK sesuai dengan SPM	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Sosnakertrans	5.000.000.000	APBN
				3 Terlaksana Penyelenggaraan pekan bursa tenaga kerja	10 kali	2	2	2	2	2	Dinas Sosnakertrans	500.000.000	APBD Kab
				4 Terjalinnya kerja sama dengan lembaga penyalur tenaga kerja	25 organisasi	5	5	5	5	5	Dinas Sosnakertrans	250.000.000	APBD Kab
2	**Perlindungan ketenagakerjaan**	2.1 Perlindungan Hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan	Terjaminnya kepastian hukum tenaga kerja	Terlaksananya fasilitasi terhadap tenaga kerja yang tersangkut masalah hukum	5 Paket	1	1	1	1	1	Setda, Dinas Sosnakertrans	200.000.000	APBD Kab
3	**Pembangunan ketransmigrasian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kawasan tidak layak huni**	3.1 Pengembangan resettlement transmigrasi lokal	Terkonsentrasi sejumlah penduduk kawasan yang layak huni	Terlaksananya resettlement dan transmigrasi lokal	1 Paket	-	-	-	1	-	Bappeda, Dinas Sosnakertrans	20.000.000	APBD Kab
E	**Pelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**												
1	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	1.1 Pengendalian dan pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan	Terkendalinya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian dan keseimbangan alam	1 Terlaksana pengendalian dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan pengolahan SDA wajib lulus uji KLHS, AMDAL dan kajian lingkungan lainnya	5 Paket	1	1	1	1	1	Bappeda, Kantor Lingkungan Hidup	300.000.000	APBN, APBD Prop

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan	2.1 Pengawasan dan pengendalian pengrusakan hutan	Tercegahnya kerusakan hutan	1 Terlaksananya operasional pencegahan dan pengendalian terhadap kerusakan hutan dan lahan	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	800.000.000	APBN, APBD Prop
				2 Tertanamnya dan terpeliharanya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan tanaman hutan rakyat	500 Ha	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.750.000.000	APBN, APBD Prop
	JUMLAH											**451.010.400.000**	

Agenda 4: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal , Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Percepatan Pembangunan Nagari (Daerah) Tertinggal**												
1.1.	Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan penanggulangan kemiskinan	1.1.1 Pendataan dan pemetaan masyarakat miskin	Terdatanya masyarakat miskin berdasarkan nama, alamat dan potensi serta karakteristik	Terlaksana penyusunan dan evaluasi data yang komprehensif tentang penduduk miskin Kabupaten Solok	2 Paket	1	-	-	-	1	Bappeda, BPM, Statistik	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.1.2 Koordinasi penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan nagari tertinggal	Efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan nagari tertinggal	Terlaksana koordinasi dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dan percepatan daerah tertinggal	5 Paket	1	1	1	1	1	Bappeda, BPM	250.000.000	APBD Kab
1,2	Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Nagari tertinggal	1.2.1 Pembangunan jalan utama termasuk jembatan pada nagari – nagari tertinggal dan atau terisolir (jalan kabupaten maupun jalan lingkungan)	Lancarnya Perhubungan/mobilitas orang dan barang dari dan ke Nagari tertinggal	1 Terlaksana pembangunan jalan pada nagari tertinggal dalam rangka pengentasan dan penanganan daerah tertinggal	143,1 KM	30	30	30	30	23,1	Dinas Pekerjaan Umum	45.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terbangunnya jembatan pada nagari tertinggal	12 unit	-	3	3	3	3	Dinas Pekerjaan Umum	9.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.2 Pembangunan dan penataan pasar nagari daerah tertinggal	Lancar dan meningkatnya proses transaksi ekonomi di Nagari	Terbangun pasar daerah terisolir/tertinggal	3 unit	-	1	1	1	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperindag dan UMKM	1.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.3 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di nagari tertinggal termasuk embung	Meningkatnya produktifitas lahan pertanian di nagari tertinggal	Terlaksana peningkatan cakupan layanan irigasi di nagari tertinggal.	1782 Ha	100	200	500	600	482	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum	5.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.4 Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat nagari tertinggal	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nagari tertinggal	Terlaksana pemasangan jaringan listrik untuk RT yang tidak dapat dialiri listrik PLN	2500 RT	500	500	500	500	500	Dinas Pertambangan dan Energi	2.000.000.000	APBD Kab
		1.2.5 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni pada daerah tertinggal	Berkurangnya rumah tidak layak huni di nagari tertinggal	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah (direnovasi) terlaksana bedah rumah	330 Unit	85	85	40	40	80	BPM, Disosnakertrans, dan Dinas Pekerjaan Umum	3.300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.6 Penyediaan layanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan di daerah tertinggal	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat daerah tertinggal	Terbangunnya sarana air bersih di 23 Nagari tertinggal	23 Nagari	5	5	5	4	4	Dinas Pekerjaan Umum	6.325.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	**Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Keluarga/Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Sosial**												
2,1	Jaminan pemeliharaan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi penduduk miskin	2.1.1 Penyediaan jaminan pemeliharaan sosial, pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya bagi penduduk miskin	Terjaminnya penduduk miskin dalam memperoleh pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya	Terlaksananya pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan sosial	100%	20	30	50	70	100	Setda, Bappeda, Disosnakertrans, BKBPP, Dinas Kesehatan, kantor Ketahanan Pangan	200.000.000	APBN dan APBD Kab
2,2	Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	2.2.1 Penyediaan jaminan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial, orang cacat dan orang terlantar	Tersedia jaminan bagi PMKS	Terlaksana urusan kegiatan penanganan penyandang masalah sosial, orang cacat dan orang terlantar	5 Keg	1	1	1	1	1	Dinas Sosnakertrans	500.000.000	APBN APBD Prop dan APBD Kab
		2.2.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	Terlaksana upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	30 Orang	30	30	30	30	30	Dinas Sosnakertrans	250.000.000	APBD Kab
		2.2.3 Pembinaan penyandang masalah sosial, orang terlantar dan cacat	Mandirinya penyandang masalah, orang terlantar dan cacat dalam menjalani kehidupannya secara layak	Terlaksana peningkatan keterampilan kecakapan hidup penyandang masalah sosial, orang terlantar dan cacat	100 org	20	20	20	20	20	Dinas Sosnakertrans	600.000.000,0	APBN dan APBD Kab
		2.2.4 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Sosial	Pengayoman Panti Asuhan/Panti Sosial	Beroperasionalnya panti asuhan / panti sosial secara layak	8 panti	8	8	8	8	8	Dinas Sosnakertrans	360.000.000	APBN dan APBD Kab
3	**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin**												
3.1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	3.1.1 Peningkatan SDM	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat miskin	Terlaksananya pembinaan masyarakat miskin dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan	5000 org	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Sosnakertrans, BPM	3.700.000.000	APBN dan APBD Kab
		3.1.2 Penyediaan bantuan modal usaha (ventura dan natura)	Kuat dan berdayanya kelembagaan usaha masyarakat miskin	Terhindarnya kelompok usaha masyarakat miskin dari jeratan rentenir di 74 nagari	74 Nagari	74	74	74	74	74	Dinas Sosnakertrans, BPM, Dinas Koperindag & UMKM	3.700.000.000	APBN dan APBD Kab
		3.1.3 Fasilitasi pemasaran	Terserapnya produk (barang dan jasa) masyarakat miskin di pasar	Terlaksana fasilitasi kerjasama antara kelompok masyarakat miskin dengan penyalur produk barang dan jasa	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Koperindag dan UMKM	400.000.000	APBN dan APBD Kab
	JUMLAH											**82.885.000.000**	

Agenda 5: Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
1	Memantapkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal, informal dan non formal	1.1 Pengembangan Pendidikan anak usia dini yang berkualitas, adil, merata dan terjangkau	Meningkatnya daya tampung dan kualitas pelayanan PAUD/TK dari 38 % menjadi 67% APK	1 Terlaksana pengembangan rintisan PAUD/TK :									
				a. PAUD Percontohan	10 unit	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. TK Pembina	7 unit	1	2	2	2	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terlaksana penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk :									
				a. PAUD	180 Paket	36	36	36	36	36	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. TK	160 Paket	32	32	32	32	32	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Terlaksana penyediaan Mobiler Sekolah untuk									
				a. PAUD	360 Lokal	72	72	72	72	72	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.800.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. TK	320 Lokal	64	64	64	64	64	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Terwujudnya sekolah sehat									
				a. PAUD	60%	-	15	15	15	15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. TK	60%	-	15	15	15	15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				5 Terlaksana pengintegrasian Posyandu dengan PAUD dan BKB	74 Nagari	14	15	15	15	15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, BKBPP, Kemenag dan BPM	1.850.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2 Pemantapan pencapaian tuntas wajib belajar pendidikan dasar	Tercapainya tuntas wajar 9 Tahun paripurna	1 Pemetaan SD/MI/MTs/SMP	2 paket	-	1	-	1	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terbangunnya USB untuk SD/MI/MTs	5 unit	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	6.400.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) dan ruang penunjang lainnya									
				a. SD/MI	250 unit	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	40.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	60 unit	12	12	12	12	12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	9.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Terlaksana rehabiltasi Gedung									
				a. SD/MI	869 Lokal	170	170	173	178	178	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	43.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	120 Lokal	24	24	24	24	24	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	6.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Tersedianya Mobiler Sekolah									
				a. SD/MI	470 Lokal	94	94	94	94	94	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	2.800.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	70 Lokal	20	20	10	10	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	420.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Terlaksana Penyelenggaraan Paket A Setara SD	21 paket	5	4	4	4	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Terlaksana Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	5 Thn	12	12	8	8	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	1.848.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				8 Terlaksana Pemberian Beasiswa dari kelompok miskin dan DO	5 Thn	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	6.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				9 Sekolah sehat	60%	-	15	15	15	15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	8.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.3 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan menengah	Meningkatnya APK SMU/SMK/MA Paket C dari 49% menjadi 60% Tercapainya rasio SMA:SMK 30:70	1 Pemetaaan SMA/MA/SMK	2 Paket	-	1	-	1	-	Dinas Pendidikan, pemuda, dan Olah Raga	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terlaksana Pembangunan USB SMK	5 USB	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	11.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Terlaksana Pembangunan RKB / RPL	75 unit	15	15	15	15	15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	8.250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Rehabiltasi Gedung SLTA	34 Sklh	7	7	7	7	6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	68.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Pengadaan mobiler siswa dan guru	300 paket	60	60	60	60	60	Dinas Pendidikan, pemuda, dan Olah Raga	2.383.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Penyelenggaraan paket C setara SLTA	5000 org	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	8.750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Pemberian beasiswa miskin dan berprestasi	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	7.200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				8 Sekolah sehat	60%	-	15	15	15	16	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	4.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
2	Mengembangkan pendidikan Non formal dan Informal di tengah masyarakat.	2.1 Penyelenggaraan program pemberantasan buta huruf	Tuntasnya pemberantasan Buta Huruf Usia 15 s/d 45 Tahun	Tercapai Jumlah penduduk buta aksara yang dilayani melalui program keaksaraan	1.940 orang	500	500	940	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.2 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi anak putus sekolah/WB Paket A, Paket B dan Paket C	meningkatnya kemampuan dan kecakapan hidup pada generasi muda putus sekolah dari keluarga miskin	Terlaksananya kelompok pemuda produktif melalui aneka keterampilan	50 klp	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	1.250.000.000	APBN dan APBD Kab
		2.3 Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Makin terpenuhi kebutuhan belajar masyarakat melalui PKBM	Terbina 10 PKBM	10 PKBM	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
		2.4 Peningkatan pemahaman siswa terhadap bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV / AIDS	Berkurangnya kasus penyalahgunaan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS	Terlaksana penyuluhan bahaya narkoba , HIV / AIDS bagi siswa SMP dan SMA	10.000 Siswa	2000	2000	2000	2000	2000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, BKBPP	305.255.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.5 Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya pemahaman siswa SMA / SMK/MA akan kesehatan Reproduksi Remaja	Berfungsinya pusat konseling remaja di sekolah setingkat SMA	34 sekolah	29	30	31	34	34	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, BKBPP	350.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.6 Pembinaan Lembaga Kursus	Tertatanya pendirian dan pengelolaan lembaga kursus	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kursus	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.7 Pengembangan Bimbingan teknis perpustakaan umum, nagari dan taman bacaan masyarakat dan mesjid	Berkembangnya minat baca masyarakat nagari	Jumlah pengelola perpustakaan umum nagari dan taman bacaan yang mendapatkan bimbingan teknis	375	75	75	75	75	75	Kantor Arsip dan Perpustakaan	350.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.8 Pemberdayaan perpustakaan daerah	Meningkatnya kunjungan perpustakaan daerah	Terlaksanaanya pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling dan Pustaka daerah	Paket	1	1	1	1	1	Kantor Arsip dan Perpustakaan	375.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
3	Peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan dengan menerapkan "*Pendidikan Berkarakter*" berbasis *"Potensi personal"* pada *"sekolah efektif"*	3.1 Pengembangan kemampuan personal siswa	Optimalnya perkembangan potensi personal siswa	1 Pemetaan potensi personal siswa	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.875.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terlaksana Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa									
				a. PAUD / TK	10 keg	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SD/MI	35 Paket	7	7	7	7	7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.650.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMP/MTs	45 Paket	9	9	9	9	9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.700.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				d. SMA/MA/SMK	50 Keg	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5.700.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.2 Pengembangan Sekolah Efektif	Terlaksana model pengembangan sekolah efektif	1 Terlaksananya pengembangan sekolah efektif	24 sekolah	-	6	6	6	6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.3 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu dan daya saing pendidikan	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan	Tersedianya ruang labor, ruang prakter, labor komputer dan jaringan internet :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				1 Pengembangan jaringan Pendidikan nasional (Jardiknas)	42 Sekolah	-	10	11	11	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	840.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Pembangunan Ketrampilan / labor Komputer									
				a. SD/MI	69 Unit	14	14	14	14	13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	13.250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	28 Unit	8	8	5	4	3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5.350.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	5 unit	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Pembanggunan Labor IPA SLTA	25 unit	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.800.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Pembanggunan Labor Bahasa SLTA	18 unit	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Pembangunan ruang bengkel / ruang keterampilan SMA/SMK	18 unit	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Penggadaan alat dan bahan praktek SLTA / SMK	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	450.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SMP/SMA/SNI									
				a. SD/MI	255 unit	51	51	51	51	51	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	40.800.000.000	APBN dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	20 unit	4	4	4	4	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.200.000.000	APBN dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	3 Unit	1	1	1	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	480.000.000	APBN dan APBD Kab
				8 Penyediaan Buku Pelajaran (buku Pokok) dan bahan referensi									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				a. SD/MI	205000 Expl	41000	41000	41000	41000	41000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5.125.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	150000 Expl	30000	30000	30000	30000	30000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	100000 Expl	20000	20000	20000	20000	20000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				9 Pengadaan Alat-alat praktek dan Peraga Siswa									
				a. SD/MI	70 Paket	14	14	14	14	14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	40 Paket	8	8	8	8	8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				10 Penyediaan Sanitasi dan air Bersih									
				a. SD/MI	140 unit	28	28	28	28	28	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.800.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	30 unit	6	6	6	6	6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	29 Unit	6	6	6	6	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	580.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				11 Penyediaan Sarana Olah Raga									
				a. SD/MI	210 paket	42	42	42	42	42	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.050.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	50 Paket	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	29 Paket	6	6	6	6	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	145.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				12 Penyediaan TIK									
				a. SD/MI	70 paket	14	14	14	14	14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	490.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	25 paket	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.375.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c. SMA/SMK	5 paket	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.225.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				13 Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
				a. SD/MI	70 Paket	14	14	14	14	14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	65 Paket	14	13	13	13	13	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1.625.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				14 Pembangunan ruang UKS									
				a. SD/MI	70 Unit	14	14	14	14	14	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	30 Unit	6	6	6	6	6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.400.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				15 Pembangunan Rumah Dinas di daerah sulit dan terpencil									
				a. SD/MI	25 Unit	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	6.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b. SMP/MTs	15 Unit	3	3	3	3	3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	3.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.4 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.	Meningkatnnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan sertifikasi guru, dan kegiatan mutu lainya	1 Tercapainya 100 % guru yang lulus sertifikasi	100%	30	60	80	100	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terlaksana Pemberdayaan MGMP, K3S, MKKS dan KKG, MKPS serta KKPS	1800 pertemuan	360	360	360	360	360	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	9.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				3 Pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga pendidikan serta tunjangan untuk guru terisolir	5 kali	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Terlaksana Pemberdayaan tim pengembang kurikulum	5 kali	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	375.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Terlaksana Pemberian beasiswa untuk S1, S2 dan S3 bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu serta berkomitmen membangun daerah									
				S1 10 org @ Rp. 3.000.000	50 org	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	150.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				S2 5 org @ Rp. 5.000.000	25 org	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	125.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				S2 2 org @ Rp. 7.500.000	10 org	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.5 Pembinaan manajemen sekolah	Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah	Terlaksananya akreditasi dan penilaian kinerja sekolah									
				a PAUD/TK	50 Sklh	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				b SD	250 Sklh	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				c SLTP	84 Sklh	16	17	17	17	17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	840.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				d SLTA	27 Sklh	6	6	6	6	3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	270.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.6 Kerjasama dg perguruan tinggi,organisasi profesi dan dunia usaha serta lembaga lainya dalam rangka peningkatan mutu, tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi , organisasi profesi dan dunia usaha serta lembaga lainnya.	1 Terlaksananya Kerjasama peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru	500 guru	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	75.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
				2 Terlaksana kerjasama pendidikan antar negara atau antar sekolah melalui sistem scholl dll	5 paket	1	1	1	1	1	Bappeda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.000.000.000	APBD Kab, NGO
				3 Pembinaan sekolah model berbasis kurikulum Alquran,Lalu lintas dan PBKL	3 SMA	1	1	1	-	-	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
					3 SMP	1	1	1	-	-	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
4	Peningkatan peran serta semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	4.1 Pemberdayaan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat peduli pendidikan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	Terfasilitasinya program kegiatan pendidikan dan komite sekolah	5 Sklh	1	1	1	1	1	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kemenag	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
	JUMLAH											**430.651.255.000**	

Agenda 6: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas merata adil dan terjangkau**	**1,1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)**		Terlaksana peningkatan sarana / prasarana kesehatan melalui :									
		1.1.1 Pengadaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan KB	Semakin lengkap ketersediaan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang memenuhi standar kelayakan dan rasio pelayanan	1 Pembangunan dan penyediaan peralatan Puskesmas	2 unit	-	1	1	-	-	Dinas Kesehatan	10.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Pengadaan Puskesmas Keliling dan kelengkapannya	20 Unit	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan	5.800.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Pembangunan Poskesri	100 unit	15	15	20	25	25	Dinas Kesehatan	25.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Pembangunan Labkesda	1 unit	-	1	-	-	-	Dinas Kesehatan	700.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Pemeliharaan dan revitalisasi Puskesmas	18 Psksmas	3	4	4	4	3	Dinas Kesehatan	3.600.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Pemeliharaan dan revitalisasi Puskesmas Pembantu	42 unit	8	10	10	8	6	Dinas Kesehatan	2.100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Pemeliharaan dan revitalisasi Poskesri	58 unit	10	12	12	12	12	Dinas Kesehatan	2.320.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				8 Pengadaan peralatan Poskesri	100 unit	15	15	20	25	25	Dinas Kesehatan	15.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
			Semakin baiknya pelayanan KB terhadap masyarakat	Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pelayanan KB	5 paket	1	1	1	1	1	BKBPP	2.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.2 Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana dan daya tampung RSUD	Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan sesuai dengan standar minimal RSUD	1 Terpenuhi 100 % kebutuhan sarana pelayanan berkualitas (gedung dan peralatan) RSUD Arosuka Type C	Persen	30	60	90	100	-	RSUD	10.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Terlaksananya studi kelayakan penambahan RSUD di kawasan solok bagian selatan	1 paket	-	1	-	-	-	Bappeda, Dinas Kesehatan	300.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2 Program Peningkatan Sediaan Farmasi (Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Keluarga Berencana) Dan Makanan Minuman											
		1.2.1 Penyediaan Sediaan farmasi (obat dan perbekalan kesehatan)	Terpenuhi 100 % kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Persentase ketersediaan sediaan farmasi, memenuhi standar cukup di pusat pelayanan kesehatan (RSUD, Puskesmas, Pustu/Poskesri)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, RSUD	20.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Persentase ketersediaan alat-alat KB di 14 Kecamatan sesuai kebutuhan maksimal	Persen	100	100	100	100	100	BKBPP	10.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.2 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dari 30 % menjadi 70 %	1 Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persen	30	40	50	60	70	Dinas Kesehatan, RSUD	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Persentase puskesmas rawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persen	30	40	50	60	70	Bappeda, Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.3 Pemberdayaan konsumen/ masyarakat dibidang sediaan farmasi dan makanan / minuman	Meningkatnya pengetahuan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan	Terlaksana pembinaan dan penyuluhan tentang obat dan makanan pada kelompok masyarakat	klmpk	20	20	20	20	20	Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag & UMKM	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.4 Peningkatan pengawasan keamanan farmasi ,pangan dan bahan bebahaya	Menurunnya tingkat pelanggaran penggunaan bahan berbahaya pada pangan dari 27 % menjadi 10 %	Persentase pelanggaran bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya teruji laboratorium	Persen	27	22	17	14	10	Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan Pangan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.2.5 Pengembangan obat tradisional	Meningkatnya Penggunaan Obat Tradisional daerah dari 40 % menjadi 75 %	Persentase Peningkatan penggunaan Obat Tradisional daerah	Persen	50	60	65	70	75	Dinas Kesehatan, RSUD	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1,3 Peningkatan Upaya Kesehatan dasar dan rujukan											
		1.3.1 Pemantapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin	Terjaminnya akses masya-rakat miskin untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Tersedianya regulasi jaminan penduduk miskin untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Perda	-	1	-	-	-	Dinas Kesehatan, RSUD	75.000.000	APBD Kab
				2 Persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persen	10	10	15	15	15	Dinas Kesehatan	150.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.3.2 Peningkatan Upaya Kesehatan Ibu , Anak dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu, Bayi, Anak termasuk Kesehatan Reproduksi yang ditandai dengan tercapainya SPM di bidang pelayanan Kesehatan Ibu,Bayi,Anak dan kesehatan Reproduksi	1 Cangkupan kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	84	86	88	90	90	Dinas Kesehatan	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	Persen	95	96	97	98	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	84	85	88	90	95	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Cakupan pelayanan nifas	Persen	10	20	40	50	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	84	86	88	90	90	Dinas Kesehatan	750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Cakupan kunjungan bayi	Persen	58	60	65	70	75	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Cakupan pelayanan anak balita	Persen	60	65	70	75	80	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				8 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				10 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				11 Cakupan peserta KB aktif	Persen	70	75	75	75	75	Dinas Kesehatan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.3.3 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tercapainya target SPM Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1 Jumlah kasus HIV AIDS pada kelompok resiko	Persen	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	Dinas Kesehatan	150.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Persentase ODHA yang mendapatkan ART	Persen	30	35	40	50	55	Dinas Kesehatan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	Persen	73	75	80	90	92	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Persentase Nagari dengan angka kasus baru TB Paru BTA positif/ CDR (Case Detection Rate) minimal 70 %	Persen	20	30	40	50	55	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan	Persen	86	86	87	88	89	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				6 Persentase Nagari mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA positif/SR (Success Rate) minimal 85%	Persen	82	84	86	88	90	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				7 Jumlah kasus Diare yang ditemukan	Persen	325	315	300	285	280	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				8 Jumlah kematian diare (CFR) pada saat KLB	Persen	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				9 Jumlah penemuan dan penanganan kasus baru frambusia	Persen	10	8	6	4	4	Dinas Kesehatan	120.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				10 Jumlah penemuan dan penanganan kasus kusta	Persen	9	8	7	6	5	Dinas Kesehatan	120.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				11 Jumlah kecacatan tingkat 2 kusta	Persen	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	Dinas Kesehatan	50.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				12 Persentase kasus suspect flu burung yang ditemukan, ditangani sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Dinas pertanian, Peternakan dan Perikanan	150.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				13 Persentase kasus zoonosa lainnya (rabies, antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standar	Persen	75	80	85	90	90	Dinas Kesehatan, Dinas pertanian, Peternakan dan Perikanan	1.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				14 Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	Persen	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				15 Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				16 Jumlah penemuan kasus malaria/100.000 pddk	Persen	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				17 Jumlah penemuan kasus penderita DBD/100.000 Pddk	Persen	55	54	52	51	50	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				18 % cakupan penemuan dan tatalaksana penderita Pneumonia balita	Persen	65	75	85	100	100	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				19 Persentase jorong yang mencapai UCI	Persen	80	85	90	100	100	Dinas Kesehatan	2.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				20 Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 anak	Persen	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.3.4 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	Tercapainya target SPM Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular	1 Persentase SDM yang dibina	Persen	20	25	30	35	50	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Persentase puskesmas yang melakukan mapping vektor	Persen	20	40	70	90	100	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3 Persentase Nagari yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)	Nagari	30	45	55	65	74	Dinas Kesehatan	150.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Persentase Nagari yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)	Nagari	30	45	55	65	74	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Jumlah penemuan kasus malaria	Persen	3	7	11	15	20	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.3.5 Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit akibat bencana	1 Jumlah Nagari yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana	Nagari	25	40	55	65	74	Dinas Kesehatan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Jumlah Nagari yang memiliki petugas terlatih penanggulangan krisis kesehatan	Nagari	30	45	55	65	74	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Jumlah Nagari yang terpenuhi fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan	Nagari	30	45	55	65	75	Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1,4 Upaya Peningkatan kecukupan dan kualitas gizi masyarakat											
		1.4.1 Peningkatan keberagaman konsumsi pangan untuk mencapai gizi seimbang	Semakin baiknya keseimbangan dan keberagaman pangan masyarakat	1 Jumlah kecamatan yang bebas 4 masalah gizi utama	Kec.	14	14	14	14	14	Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan Pangan	2.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	68,6	69,5	70,8	71,6	72,5	Dinas Kesehatan, Kantor Ketahanan Pangan	750.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.4.2 Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin essensial masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan makanan tambahan dan vitamin bayi, balita, anak remaja putri dan ibu hamil	1 Persentase Bayi BGM yang mendapatkan makan tambahan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Persentase bayi dan balita yang mendapatkan vitamin A (2 kali setahun)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Persentase remaja putri yang mendapatkan Fe tablet sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Persentase ibu nifas yang mendapatkan Vitamin A	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		1.4.3 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang garam yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat besi mikro lainnya	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang garam yodium (GAKI), kurang vitamin A dan kekurangan zat besi mikro lainnya	1 Persentase ibu hamil mendapat Fe 90	Persen	80	81	82	83	85	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	Persen	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	Dinas Kesehatan	50.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Persentase kasus yang mengalami kurang Vitamin A mendapat vitamin A	Persen	87	88	89	90	90	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	1.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
2	**Pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat**	**2,1 Promosi kesehatan, KB dan pemberdayaan masyarakat**											
		2.1.1 Peningkatan upaya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 5 (lima) tatanan dari < 50% menjadi 80%	1 Persentase Rumah tangga dengan PHBS	Persen	50	55	60	65	70	Dinas Kesehatan	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Persentase institusi sekolah yang ber PHBS	Persen	40	70	80	90	100	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3 Persentase Institusi Kesehatan dengan PHBS	Persen	70	80	90	100	100	Dinas Kesehatan	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				4 Persentase institusi tempat kerja dengan PHBS	Persen	25	30	35	40	40	Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				5 Persentase Tempat-Tempat umum dengan PHBS	Persen	15	20	25	30	30	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.1.2 Pemberdayaan Upaya Kesehatan Kerja sektor Non Formal	Meningkatnya persentase sektor non formal yang berwawasan kesehatan dari 15 menjadi 35%	Persentase sektor non formal yang berwawasan kesehatan	Persen	5	10	15	25	35	Dinas Kesehatan	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.1.3 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulanan kesehatan	Meningkatnya persentase Jorong Siaga Aktif dari 50 % menjadi 80 %	Persentase Jorong Siaga Aktif	persen	60	70	80	80	80	Dinas Kesehatan	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		2.1.4 Program keluarga berencana dan sejahtera	Tercapai SPM akseptor KB aktif 80%	Terlaksana program pemberdayaan dan pembinaan KB, keluarga harapan dan keluarga sejahtera secara terpadu	5 paket	1	1	1	1	1	BKBPP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosnakertrans	2.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
3	**Peningkatan kualitas manajemen dan standar pelayanan kesehatan**	**3,1 Standarisasi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana**											
		3.1.1 Penyusunan dan Pengendalian Standar Pelayananan Minimal Kesehatan dan KB sesuai potensi dan kondisi daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan KB pada semua unit	1 Tersedia Standar Pelayanan Minimal kesehatan dan KB sesuai potensi dan kondisi daerah	2 paket	1	1	-	-	-	Dinas Kesehatan, BKBPP	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Pencapaian Standar Akreditasi pada RSUD dan ISO 9001 Puskesmas	5 unit	-	-	1	2	2	Dinas Kesehatan, RSUD	250.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3.2 Pengembangan, Peningkatan, Pemantapan dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan											
		3.2.1 Pengembangan Sistem informasi kesehatan dan KB	Terpenuhi 100 % kebutuhan data kesehatan secara cepat, akurat dan tepat untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah.	1 Persentase Ketersediaan data Profil Kesehatan dan KB di Kabupaten dan Puskesmas di Kab. Solok	100%	80	85	90	95	100	Dinas Kesehatan, BKBPP	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Jumlah Puskesmas yang mengembangkan Sistim Informasi Kesehatan terintegrasi	18 puskesmas	4	8	12	18	18	Dinas Kesehatan	2.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3.2.2 Penyebarluasan data dan informasi pembangunan kesehatan	Semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi pemba-ngunan kesehatan	Publikasi/peluncuran data base kesehatan secara lengkap dan komprehensif	kali / tahun	1	1	1	1	1	Setda, Dinas Kesehatan	200.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
4	**Memantapkan pembangunan lingkungan yang sehat, kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial**	**4,1 Pengendalian pencemaran kualitas lingkungan**											
		4.1.1 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	Terpantaunya kegiatan-kegiatan yg dapat berdampak terhadap lingkungan hidup	1 Jumlah pengujian terhadap kualitas air minum yang memenuhi standar	Paket	48	50	52	54	60	Dinas Kesehatan	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Jumlah pengujian rumah sehat	Paket	40	42	45	50	55	Dinas Kesehatan	500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		4.1.2 Penyehatan Lingkungan	Persentase kawasan yang memenuhi standar lingkungan sehat	Persentase Institusi, tempat-tempat umum, dan tempat pengelolaan makanan yang menerapkan kebijakan lingkungan sehat	persen	40	50	60	70	70	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Lingkungan Hidup	100.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		4.1.3 Pembangunan air bersih dan sanitasi	Tercapainya target MDGs tentang air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga dengan air bersih dan sanitasi sehat dari 47% menjadi 67%	persen	50	53	55	60	67	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, PDAM	25.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		JUMLAH										**156.910.000.000**	

Agenda 7: Pengembangan Kepariwisataan dan Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mewujudkan Kabupaten Solok menjadi destinasi (tujuan) wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat	1.1 Pengembangan Kawasan Wisata secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat	Terwujudnya kawasan wisata terpadu	Tuntasnya penataan dan pengembangan infrastruktur kawasan wisata :									
				1 Kawasan Danau Kembar; Agrowisata, konvensi dan taman bermain anak sebesar 15 %	15%	-	-	5	5	5	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	10.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				2 Kawasan Singkarak; wisata air, taman bermain anak-anak serta minat khusus; paralayang dan offroad sebesar 20%	20%	10	10	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Budaya	5.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
				3 Kawasan Arosuka ; wisata keluarga, outbond, camping sebesar 60%	60%	15	15	10	10	10	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	50.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab dan Swasta
		1.2 Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata domestik rata-rata 15 % per tahun dan manca negara rata-rata 10% per tahun	1 Terlaksananya promosi wisata dan ekspo, even-even wisata daerah, nasional dan internasional	30 even	6	6	6	6	6	Dinas Pariwisata dan Budaya	7.500.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab dan Swasta
				2 Terlaksana Kerjasama pengelolaan kepariwisataan dengan Biro perjalanan/ agen perjalanan wisata	20 biro	-	5	5	5	5	Dinas Pariwisata dan Budaya	100.000.000	APBD Kab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.3 Pensinergian pengembangan kepariwisataan dengan sektor budaya, industri dan pertanian	Meningkatnya sinergitas sektor pertanian, industri dan jasa dengan kepariwisataan	Terlaksana fasilitasi usaha-usaha pertanian, industri dan jasa yang mendukung program kepariwisataan	3 Kawasan	3	3	3	3	3	Setda, Dinas Koperindag & UMKM, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Budaya	750.000.000	APBD Kab
2	Pembinaan masyarakat sadar wisata	2.1 Pembinaan Manajemen Kepariwisataan bagi pelaku/pengelola wisata lokal dan masyarakat sekitar objek wisata	Meningkatnya daya dukung masyarakat dan pelaku usaha wisata lokal dalam mewujudkan kabupaten Solok sebagai salah satu destinasi wisata Sumbar	Terlatih/ terbinanya kelompok pengelola wisata dan masyarakat disekitar objek wisata dengan Sapta Pesona Wisata	5 Klp	1	1	1	1	1	BPM dan Dinas Pariwisata dan Budaya	200.000.000	APBD Kab
3	Pelestarian Nilai dan Kekayaan Budaya Daerah	3.1 Pembinaan terhadap kelompok-kelompok pelestarian budaya daerah	Makin eksisnya kelompok-kelompok pelestari budaya daerah	Teraplikasikannya tradisi-tradisi kebudayaan daerah secara natural dalam tatanan kehidupan masyarakat nagari.	60 Klp	12	12	12	12	12	Dinas Pariwisata dan Budaya	300.000.000,0	APBD Kab
		3.2 Pelestarian dokumentasi, peninggalan budaya dan benda bersejarah lainnya	Terjaganya dokumentasi, peninggalan budaya dan benda bersejarah lainnya sebagai asset berharga daerah	Terlaksana Perawatan dan pengelolaan dokumentasi, peninggalan budaya dan benda bersejarah lainnya.	5 Paket	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata dan Budaya	1.000.000.000	APBN, APBD Kab
		3.3 Penyusunan/Pencetakan Buku Sejarah/Tambo Nagari	Adanya dokumentasi tertulis tentang akar budaya dan tatanan adat yang dianut oleh masyarakat nagari	Tersusunnya / terlaksana upaya dokumentasi Adanya tambo nagari dan atau sejarah nagari	74 Nagari	15	15	15	15	14	Setda, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kantor Arsip dan Perpustakaan	740.000.000	APBD Kab
	JUMLAH											**75.590.000.000**	

Agenda 8: Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan

No	Arah Kebijakan Tahun 2011-2015	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja Tahun 2015	Volume / Satuan	Target Capaian					SKPD	Pagu Dana Indikatif	Sumber Dana
						2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembinaan kepemudaan	1,1 Pembinaan organisasi kepemudaan	Tumbuhkembangnya organisasi kepemudaan secara mandiri dan profesional	1 Terlaksananya temu pemuda 1 kali setahun	5 kali	1	1	1	1	1	Setda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500.000.000	APBN, APBD Kab
				2 Terlaksananya pelatihan manajemen kepemimpinan bagi para pemuda pelopor pembangunan daerah	4 kali	-	1	1	1	1	Setda, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	500.000.000	APBD Kab
		1,2 Pengembangan pemuda pelopor, mandiri dan berprestasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemuda pelopor, mandiri serta berprestasi	Terlaksananya agenda tahunan pengembangan pemuda pelopor, mandiri dan berprestasi	5 kali	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosnakertrans	300.000.000	APBD Kab
2	Peningkatan prestasi olah raga	2,1 Pemberdayaan KONI	Meningkatnya pembinaan cabang-cabang olah raga prestasi yang potesial melalui wadah KONI	Tercapai Kabupaten Solok masuk 5 besar dalam Porprop, even regional dan nasional	2 kali	-	1	-	1	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	5.000.000.000	APBD Kab
			Munculnya kaderisasi olahragawan, pelatih, wasit dan hakim di Kabupaten Solok	1 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengelola olahraga	5 kali	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	400.000.000	APBD Kab
				2 Terlaksananya pemberian reward bagi sosok tokoh olahraga daerah	5 kali	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	250.000.000	APBD Kab
		2,2 Penyelenggaraan kompetisi reguler secara rutin	Menumbuhkan jiwa kompetisi dan sportifitas atlet-atlet daerah	Terlaksananya pekan olahraga Kabupaten Solok	1 kali	-	-	1	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	300.000.000	APBD Kab
3	Pemberdayaan perempuan	3,1 Perlindungan perempuan terhadap KDRT	Tidak ditemukannya tindak kekerasan dalam Rumah tangga	Terwujudnya kesetaraan dan rasa saling menghargai dalam keluarga / rumah tangga	100%	1	1	1	1	1	Setda, BKBPP, BPM	300.000.000	APBD Kab
		3,2 Peningkatan sumber daya perempuan dalam kemandirian ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat di atas indek kemiskinan daerah	80% dari KK miskin	15	20	20	15	10	Setda BKBPP, BPM, Dinas Koperindag & UMKM	3.000.000.000	APBN, APBD Prop dan APBD Kab
		3,3 Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan gender	Terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya partisipasi perempuan sesuai target nasional 30 %	%	30	30	30	30	30	Setda, BKBPP, BPM	300.000.000	APBD Kab
	JUMLAH											**10.850.000.000**	
	JUMLAH TOTAL											**1.496.136.655.000**	

BAB IX
P E N U T U P

9.1. Strategi Pelaksanaan

Strategi pencapaian indikator pembangunan dan kaedah pelaksanaan Tahun 2011-2015 tersebut, adalah;

1. Pengorganisasian (struktur pemerintahan) yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel
2. Penataan instrumen yang menjadi dasar hukum; evaluasi Perda/Perbup dan membuat dasar hukum yang lebih kontekstual dan futuristik
3. Peningkatan kapasitas SDM dan kesejahteraan aparatur agar lebih profesional, kompetitif dan berdaya juang tinggi
4. Perubahan *paradigma* aparatur agar berorientasi ***pelayanan prima*** dan mengutamakan kepuasan pelanggan
5. Dukungan pendanaan yang memadai
6. Pengendalian dan pengawasan yang komprehensif dan konsisten
7. Dukungan politik dan dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka kebijakan dan strategi dasar yang perlu dikembangkan adalah;

1. Peningkatan produktifitas semua sektor ekonomi.
2. Pengembangan komoditas pertanian strategis dengan pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi dan difersifikasi berdasarkan potensi dan daya dukung kawasan / wilayah kecamatan dan nagari.
3. Mengoptimalkan pengembangan pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan (Wisata agro, wisata alam dan wisata budaya).
4. Perlindungan dan penguatan ekonomi lemah seperti UMKM dan petani kecil
5. Pembangunan infrastruktur vital dan pendukung produktifitas ekonomi dan percepatan pengentasan keterisoliran atau ketertinggalan wilayah
6. Kerjasama antar wilayah, antar pemerintahan dan dengan perantau
7. Kebijakan daerah yang *ramah investasi* (kepastian hukum, perizinan, kompensasi yang saling menguntungkan)

Sedangkan untuk ***penanggulangan masalah kemiskinan,*** kebijakan dan strategi dasar yang perlu dikembangkan adalah;

1. Pemetaan dan Rencana Aksi Penanggulangan kemiskinan terpadu dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat local.
2. Jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dengan menggunakan sistem dan pendekatan yang terpadu.
3. Kebijakan anggaran dan pembangunan yang *pro poor* dan *pro job* serta *pro green.*

Dalam kerangka pembangunan kehidupan beragama, sosial, budaya masyarakat yang bersandikan kitabullah, maka strategi dan kebijakan dasar yang penting untuk dikembangkan adalah;

1. Penguatan peran alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai serta bundo kanduang sebagai unsur utama pembangunan nagari.
2. Penguatan simbol-simbol nagari sebagai bagian dari revitalisasi babaliak banagari, seperti; penulisan dan penyebutan nama dan simbol-simbol di nagari, mengangkat sejarah/tambo nagari, penggalian nilai budaya dan seni tradisi nagari serta memperkuat kembali semangat dan nilai gotong royong.
3. Meningkatkan peran dan fungsi surau dan mesjid sebagai pusat kegiatan belajar, penumbuhan kreatifitas, pengembangan produktifitas dan penanaman nilai-nilai agama dan budaya semenjak usia dini.
4. Pembangunan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat berbasis masyarakat.
5. Pelestarian keasrian lingkungan serta pengendalian dan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan.
6. Penjagaan dan peningkatan kualitas fasilitas umum serta fasilitas publik dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.

9.2. Kaedah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2011-2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan merupakan pedoman

bagi daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan Rencana Kerja SKPD Tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaedah-kaedah sebagai berikut **:**

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi/lembaga vertikal dilingkungan pemerintahan kabupaten, swasta/dunia usaha serta masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan RPJMD Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya.
2. RPJMD Tahun 2011-2015 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dan sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menjadi acuan bagi satuan perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.
3. RPJMD Tahun 2011-2015 juga menjadi acuan bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
4. Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJMD Tahun 2011-2015 dengan RKPD setiap tahunnya dan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari.
5. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 Bappeda mempunyai kewajiban melaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD dalam keterkaitannya dengan RKPD setiap tahunnya termasuk hal-hal yang belum diatur.
6. Penerapan RPJMD dan penjabarannya ke dalam program dan kegiatan pembangunan agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Revisi Tata Ruang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan RPJMD dan RKPD kepada Bupati Cq. Bappeda Kabupaten Solok.